

Peta Kerawanan Pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta: Pengalaman Pemilu Serentak 2019

Laporan
Penelitian



LAPORAN PENELITIAN

**Peta Kerawanan Pemilu
di Daerah Istimewa Yogyakarta:
Pengalaman Pemilu Serentak 2019**

TIM PENELITIAN:

Abdul Gaffar Karim
Arya Budi
Wahyu Kustiningsih
Wegik Prasetyo
Krisanti Arni Dinda
Gregorius Ragil

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2019

Daftar Isi

<i>Daftar Isi</i>	<i>i</i>
Bagian Pertama: Pendahuluan.....	1
<i>Bab 1: Tentang Riset ini</i>	2
Bagian Kedua: Peta Umum Kerawanan.....	7
<i>Bab 2: Partisipasi Terendah</i>	8
Kuantitas dan Kualitas Partisipasi	9
Kelompok Pemuda.....	11
Kelompok Perempuan	11
Jenis dan Sistem Pemilu: Pemilu Legislatif Proporsional Terbuka	12
Penutup.....	13
<i>Bab 3: Potensi Pelanggaran dan Konflik Horizontal</i>	15
<i>Bab 4: Kerawanan Bencana</i>	27
<i>Bab 5: Desain Dan Operasional Pemilu</i>	34
Bagian Ketiga: Kerawanan Sosial.....	39
<i>Bab 6: Setting Sosial-Politik, Distribusi Kuasa dan Kelompok Vigilante Di DIY</i> .40	
Kondisi Sosial-Politik Masyarakat DIY	40
Distribusi Kuasa di DIY	41
Kelompok Vigilante di DIY	42
Pendekatan Negara.....	45
<i>Bab 7: Kelompok Merah</i>	47
Akar Genealogi	47
Pengorganisasian Kelompok	52
Kelompok Dalam Pemilu.....	54
<i>Bab 8: Kelompok Hijau</i>	57
Genealogi	57
Klasifikasi dan Struktur Kelompok	58
Peran Kelompok Dalam Pemilu	62
Penutup.....	67
Bagian Empat: Penutup	68
<i>Bab 9: Kesimpulan</i>	69
<i>Daftar Pustaka</i>	72

Bagian Pertama: Pendahuluan

Bab 1: Tentang Riset ini

Riset ini adalah hasil kerjasama antara *Research Centre for Politics and Governments* (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY), yang dilakukan sebagai sebuah usaha untuk mengadvokasi proses konsolidasi demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Dalam riset ini dilakukan pemetaan dimensi kerawanan pemilu berdasarkan pengalaman Pemilu Serentak 2019 di DIY. Penelitian ini tidak hanya melakukan pemetaan partisipasi pemilih, namun juga untuk melihat faktor apa saja yang membuat proses partisipasi itu bekerja. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih, dibutuhkan sosialisasi yang tepat terutama di simpul-simpul kerawanan yang dianggap cenderung memiliki tingkat kuantitas dan kualitas partisipasi yang rendah. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Faktor apa saja yang membuat sebuah daerah dapat dikatakan sebagai daerah rawan pemilu?
2. Bagaimana kategorisasi daerah rawan berpengaruh terhadap proses sosialisasi dan partisipasi dalam Pemilu?
3. Apa yang menjelaskan sebuah daerah atau dimensi dalam pemilu menjadi rawan?

Salah satu perhatian dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah kategorisasi daerah yang dianggap rawan. Pengkategorisasian daerah rawan ini merupakan usaha pemerintah untuk memetakan pendekatan dalam hal sosialisasi maupun antisipasi pemilu. Namun, kategori daerah rawan yang dibuat oleh lembaga pemerintah, Bawaslu, Polri, Kemendagri, tidaklah tunggal. Ada banyak versi kategori daerah rawan yang dibuat oleh lembaga pemerintah sebagai akibat dari indikator yang terlalu beragam. Tidak adanya kategorisasi daerah rawan yang akurat membuat program-program penyelenggaraan pemilu menjadi tidak tepat sasaran dan tumpang tindih. Padahal, dibutuhkan program yang tepat dan pendekatan khusus untuk daerah rawan agar pemilu berjalan dengan baik.

Pengkategorisasian daerah rawan ini sebenarnya merupakan usaha pemerintah untuk memetakan pendekatan dalam hal sosialisasi maupun antisipasi permasalahan dalam pemilu. Namun, kategori daerah rawan yang dibuat oleh lembaga pemerintah, Bawaslu, Polri, Kemendagri, tidaklah tunggal. Ada banyak versi kategori daerah rawan yang dibuat oleh lembaga pemerintah sebagai akibat dari indikator yang terlalu beragam. Tidak adanya kategorisasi daerah rawan yang akurat membuat program-program penyelenggaraan pemilu menjadi tidak tepat sasaran dan tumpang tindih. Selain itu, penyelenggara pemilu juga harus memberikan perhatian lebih pada kualitas partisipasi, bukan hanya pada kuantitas partisipasi. Hal ini penting karena kualitas partisipasi dalam pemilu berdampak pada kualitas demokrasi yang dihasilkan. Salah satu variabel yang mempengaruhi kualitas partisipasi adalah konflik yang ada di masyarakat. DIY, mempunyai sejarah panjang konflik masyarakat terutama konflik antar “geng” baik dalam perebutan sumber ekonomi maupun wilayah kekuasaan. Konflik tersebut hingga kini masih ada dan seringkali pecah saat proses pemilu.

Pada bagian awal, penelitian ini memotret empat variable dalam peta kerawanan pemilu sebagaimana yang menjadi acuan Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilu 2019 sebagaimana di atas. Pada periode 2019, setidaknya ada empat tipe daerah rawan yang diidentifikasi oleh KPU yakni 1) daerah dengan partisipasi terendah, 2) daerah dengan potensi pelanggaran pemilu, 3) daerah rawan konflik, 4) daerah rawan bencana alam. Namun dalam perkembangan penelitian, beberapa kategori daerah rawan tidak relevan untuk menjelaskan kondisi kontekstual di DIY. Dengan mempertimbangkan kedalaman penelitian, kami berfokus pada kerawanan sosial sebagai variabel paling penting dalam menjelaskan kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu di DIY.

Penelitian ini tidak hanya melakukan pemetaan partisipasi pemilih, namun juga melihat faktor apa saja yang membuat tinggi rendahnya partisipasi. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dibutuhkan sosialisasi yang tepat terutama di daerah rawan yang dianggap cenderung memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Penelitian ini akan dimulai dengan mengidentifikasi indikator daerah rawan yang akurat agar program sosialisasi yang dilakukan KPU tepat sasaran. Penelitian ini

dilakukan dalam lima tahapan, yakni:

1. Merumuskan indikator daerah rawan yang akurat;
2. Mengukur tinggi rendah partisipasi di daerah rawan;
3. Menemukan penyebab tinggi rendahnya partisipasi di daerah rawan;
4. Menyusun desain strategi sosialisasi yang tepat sasaran di daerah rawan;
5. Penulisan output penelitian berupa laporan penelitian dan jurnal ilmiah.

Sebagai sebuah kerangka riset akademik, penelitian akan mempertimbangkan tiga hal, yakni 1) Faktor demografis, seperti kelas sosial (pendidikan, ekonomi) dan sosiologis (suku, agama); 2) Faktor geografis, seperti perbandingan daerah rural-urban dan daerah pegunungan-pesisir; dan 3) Faktor konsentrasi preferensi pemilih; seperti daerah basis simpatisan partai yang bersifat homogen dibandingkan dengan daerah yang bersifat heterogen.

Responden penelitian ini mencakup empat kategori aktor dalam pemilu, yaitu: 1) Penyelenggara pemilu: KPU, KPPS, PPS, Bawaslu, Panwaslu sebagaimana diadaptasi berdasarkan hasil FGD pertama; 2) Pengurus partai politik, kandidat, dan tim sukses; 3) Tokoh masyarakat lokal, dan tokoh kelompok partisan; dan 4) Intitusi terkait pemilu seperti Disdukcapil, pemerintah desa, kepolisian dan institusi terkait lainnya lainnya.

Analisa dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif jenis studi kasus. Studi ini dilakukan dalam cakupan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan secara spesifik akan menggali data seputar kerawanan dan partisipasi Pemilu 2019. Adapun data dikumpulkan dan diperoleh melalui forum group discussion dan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor yang berkepentingan dalam kerawanan pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi sosialisasi yang tepat untuk daerah rawan pemilu dan menganalisa perilaku pemilih terhadap partisipasi dalam konteks pemilu yang akan datang. Penerima manfaat penelitian ini adalah masyarakat di daerah rawan pemilu serta KPU DIY sebagai penyelenggara pemilu. Secara spesifik, penerima manfaat meliputi: 1) KPU DIY sebagai penyelenggara

pemilu menerima manfaat terbesar untuk merumuskan strategi sosialisasi yang tepat untuk daerah rawan dan meningkatkan partisipasi di daerah tersebut; 2) Masyarakat yang tinggal di daerah rawan; dan 3) FISIPOL UGM dapat memanfaatkan kerjasama ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil diskusi-diskusi lanjutan setelah laporan awal yang disampaikan pada KPU DIY, tim peneliti memandang bahwa kekhasan DIY terletak di aspek kerawanan sosial dan kerawanan konflik ini. Aspek kerawanan partisipasi dan kerawanan pelanggaran pemilu adalah masalah-masalah yang tidak terlalu khas DIY. Di sisi lain, KPU DIY sejauh ini menunjukkan kapasitas yang sangat bagus dalam pengelolaan kedua isu tersebut. Hal ini turut dibuktikan oleh diterimanya sejumlah penghargaan oleh KPU DIY dalam acara KPU Award 2019. Dari sembilan kategori penghargaan, KPU DIY menerima penghargaan peringkat pertama di empat kategori, dan satu peringkat ketiga di sebuah kategori. Total, KPU DIY menerima penghargaan di lima dari sembilan kategori. Ini adalah indikator bahwa kerawanan dalam aspek-aspek partisipasi dan penyelenggaraan tahapan pemilu pada intinya bisa dikelola dengan baik. Yang masih menyisakan pertanyaan adalah persoalan konflik sosial yang di DIY masih menyimpan banyak potensi masalah. Ini lah yang kemudian oleh tim peneliti dipilih sebagai fokus pendalaman lanjutan dalam kajian ini.

Pilihan ini sebenarnya sudah mulai nampak sejak FGD pertama. FGD ini menghasilkan kesepakatan di antara para narasumber bahwa kerawanan sosial terutama oleh kelompok-kelompok pemuda adalah isu sentral dalam problema kerawanan pemilu di DIY. Salah satu variabel yang mempengaruhi kualitas partisipasi adalah konflik yang ada di masyarakat. DIY mempunyai sejarah panjang konflik masyarakat terutama konflik antar kelompok-kelompok vigilante, baik dalam perebutan sumber ekonomi maupun wilayah kekuasaan. Konflik tersebut hingga kini masih ada dan seringkali justru manifes di tengah tahapan pemilu.

Oleh karena itu, penelitian ini kemudian memusatkan perhatian pada kerawanan sosial dalam pemilu di DIY. Ada tiga hal yang terutama dilakukan oleh tim peneliti.

Pertama, memetakan kelompok-kelompok vigilante dan basis sosialnya di DIY. *Kedua*, mengidentifikasi pola relasi kuasa antar kelompok itu, serta antara kelompok itu dengan pengendali alokasi sumberdaya di level yang lebih tinggi. Hal kedua ini penting dilakukan, sebab selama ini kerawanan sosial di DIY tak pernah benar-benar meletup menjadi kerusuhan sosial yang tak bisa dikendalikan. Ini disebabkan entah karena skala potensinya memang tidak besar, atau ada kendali kuat yang menyebabkan kelompok-kelompok yang berebut sumberdaya itu selalu bisa menemukan kompromi. *Ketiga*, tim peneliti juga mencoba menggali apa yang sebaiknya dilakukan oleh KPU DIY sebagai lembaga penyelenggara pemilu, dalam struktur relasi kuasa yang bekerja di DIY.

Bagian Kedua: Peta Umum Kerawanan

Bab 2: Partisipasi Terendah

Partisipasi pemilih adalah komponen yang penting dalam pemilu maupun demokrasi. Banyak studi yang mengaitkan antara tingkat partisipasi dalam pemilu dengan tingkat demokratisasi suatu negara (Radcliff, 1994; Blais & Dobrzynska, 1998; Franklin, 2004). Partisipasi pemilih merupakan indikator untuk mengukur kualitas pemilu dan kualitas demokrasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka semakin berkualitas pemilu dan demokrasi yang dihasilkan. Logika ini dibangun mengikuti logika bahwa pemilu merupakan salah satu mekanisme yang disepakati untuk melakukan suksesi kepemimpinan. Pemilu juga dimaknai sebagai aktivitas penyerahan mandat atau sebagian kedaulatan individu kepada sebagian orang untuk mengatur urusan-urusan publik (McDonald & Budge, 2005; Grossback, Peterson, & Stimson, 2006). Dalam konteks tersebut pemilu dianggap sebagai token of membership democracy (Pamungkas, 2009). Dalam pemilu, sumber legitimasi terletak pada suara pemilih. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dan suara pemilih yang diberikan, maka semakin tinggi legitimasi pemerintahan yang dihasilkan.

Bab ini terdiri ke dalam lima bagian penting. Pertama, partisipasi sebagai angka menjadi pintu masuk paling mudah untuk menjelaskan relasi antara demokrasi, pemilu, dan legitimasi sebagaimana dijelaskan di atas dan menjadi salah satu ukuran paling sederhana dalam membaca tingkat keberhasilan pemilu. Bagian kedua dan ketiga akan membahas lebih dalam tentang apa yang ada di balik angka sebagaimana dijelaskan pada bagian pertama, yaitu demografi penentu yang menjelaskan kualitas partisipasi: usia dan gender. Bagian keempat menjadi bagian yang meletakkan desain institusi pemilu sebagai variabel penjelas tentang kualitas partisipasi itu sendiri karena konsekuensi sistemik yang diakibatkannya. Terakhir, kita akan menyajikan refleksi penting dan pelajaran yang bisa ditindaklanjuti dari pembahasan lebih jauh perihal kualitas partisipasi.

Kuantitas dan Kualitas Partisipasi

Permasalahan partisipasi seringkali hanya direduksi menjadi permasalahan kuantitas yakni tentang tinggi rendahnya partisipasi. Pemilu yang berhasil seringkali diukur dari tingginya partisipasi, sedangkan pemilu yang gagal seringkali dikaitkan dengan rendahnya partisipasi. Padahal, permasalahan partisipasi juga terkait dengan akses dan kualitas partisipasi itu sendiri. Dalam konteks pemilu di DIY, secara kuantitas, partisipasi pemilih sangat tinggi. Partisipasi pemilih di DIY dalam pemilu baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif selalu di atas rata-rata nasional.

Partisipasi dalam Pilpres 2019 di DIY

NO.	URAIAN	RINCIAN					
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	KULON PROGO	BANTUL	GUNUNGKIDUL	SLEMAN	KOTA YOGYAKARTA	JUMLAH AKHIR
A.	DATA PEMILIH						
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT	334.893	707.009	605.894	774.609	309.469	2.731.874
	2. Jumlah Pemilih dalam DPTb	2.206	12.522	2.828	27.937	11.826	57.319
	3. Jumlah Pemilih dalam DPK	1.804	13.274	5.413	25.724	3.608	49.823
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	338.903	732.805	614.135	828.270	324.903	2.839.016
B.	PENGGUNA HAK PILIH						
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	289.647	621.516	501.996	679.630	262.220	2.355.009
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	1.801	9.390	2.421	22.308	9.730	45.650
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	1.702	13.173	5.078	25.465	3.602	49.020
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	293.150	644.079	509.495	727.403	275.552	2.449.679
	%KEHADIRAN	86,5%	87,9%	83,0%	87,8%	84,8%	86,3%
	%KETIDAKHADIRAN	13,5%	12,1%	17,0%	12,2%	15,2%	13,7%

Partisipasi dalam Pileg DPR RI 2019 di DIY

NO.	URAIAN	RINCIAN					
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	KULON PROGO	BANTUL	GUNUNGKIDUL	SLEMAN	KOTA YOGYAKARTA	JUMLAH AKHIR
A.	DATA PEMILIH						
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT	334.893	707.009	605.894	774.609	309.469	2.731.874
	2. Jumlah Pemilih dalam DPTb	2.206	12.522	2.828	27.937	11.826	57.319
	3. Jumlah Pemilih dalam DPK	1.804	13.274	5.413	25.724	3.608	49.823
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	338.903	732.805	614.135	828.270	324.903	2.839.016
B.	PENGGUNA HAK PILIH						
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	289.682	621.902	502.075	679.742	262.284	2.355.685
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	809	2.722	1.500	3.359	1.675	10.065
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	1.702	13.231	5.082	25.043	3.553	48.611
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	292.193	637.855	508.657	708.144	267.512	2.414.361
	%KEHADIRAN	86,2%	87,0%	82,8%	85,5%	82,3%	85,0%
	%KETIDAKHADIRAN	13,8%	13,0%	17,2%	14,5%	17,7%	15,0%

Partisipasi dalam Pileg DPD RI 2019 di DIY

NO.	URAIAN	RINCIAN					
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	KULON PROGO	BANTUL	GUNUNGKIDUL	SLEMAN	KOTA YOGYAKARTA	JUMLAH AKHIR
A.	DATA PEMILIH						
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT	334.893	707.009	605.894	774.609	309.469	2.731.874
	2. Jumlah Pemilih dalam DPTb	2.206	12.522	2.828	27.937	11.826	57.319
	3. Jumlah Pemilih dalam DPK	1.804	13.274	5.413	25.724	3.608	49.823
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	338.903	732.805	614.135	828.270	324.903	2.839.016
B.	PENGGUNA HAK PILIH						
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	289.682	621.920	502.075	679.726	262.284	2.355.687
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	809	2.721	1.500	3.366	1.680	10.076
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	1.702	13.231	5.082	25.067	3.548	48.630
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	292.193	637.872	508.657	708.159	267.512	2.414.393
	%KEHADIRAN	86,2%	87,0%	82,8%	85,5%	82,3%	85,0%
	%KETIDAKHADIRAN	13,8%	13,0%	17,2%	14,5%	17,7%	15,0%

Partisipasi dalam Pileg DPRD DIY 2019

N O.	URAIAN	RINCIAN							
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	KOTA YOGYAKARTA (DPRD DIY 1)	BANTUL (DPRD DIY 2)	BANTUL (DPRD DIY 3)	KULON PROGO (DPRD DIY 4)	SLEMAN (DPRD DIY 5)	SLEMAN (DPRD DIY 6)	GUNUNGKIDUL (DPRD DIY 7)	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(18)
A.	DATA PEMILIH								
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT	309.469	359.438	347.571	334.893	396.983	377.626	605.894	2.731.874
	2. Jumlah Pemilih dalam DPTb	11.826	4.282	8.240	2.206	19.356	8.581	2.828	57.319
	3. Jumlah Pemilih dalam DPK	3.608	6.218	7.057	1.804	14.728	10.996	5.413	49.824
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	324.903	369.938	362.868	338.903	431.067	397.203	614.135	2.839.016
B.	PENGGUNA HAK PILIH								
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	262.369	315.642	306.312	289.682	345.754	334.009	502.075	2.355.843
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	1.021	1.030	1.061	664	1.548	1.062	1.323	7.709
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	3.552	6.184	7.051	1.702	14.104	10.943	5.082	48.618
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	266.942	322.856	314.424	292.048	361.406	346.014	508.480	2.412.170
	%KEHADIRAN	82,2%	87,3%	86,6%	86,2%	83,8%	87,1%	82,8%	85,0%
	%KETIDAKHADIRAN	17,8%	12,7%	13,4%	13,8%	16,2%	12,9%	17,2%	15,0%

Walaupun secara kuantitas partisipasi memuaskan, praktik kualitas partisipasi di DIY masih perlu dilakukan perbaikan. Setidaknya ada dua variabel yang mempengaruhi kualitas partisipasi, yakni: faktor demografi (usia dan gender) dan tingkat kompetisi dalam pemilu. Dalam forum group discussion (FGD) yang telah dilakukan, bahwa anak muda di DIY cenderung aktif secara politik. Anak-anak muda ini aktif secara politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, anak muda terlibat baik menjadi peserta pemilu maupun petugas pemilu. Secara tidak langsung, anak muda terlibat juga dalam proses berlangsungnya pemilu seperti dalam kampanye dan konvoi jalanan. Biasanya anak-anak muda yang terlibat kampanye dan konvoi jalanan merupakan anak muda yang menjadi bagian dari “geng” yang sudah lama eksis di Yogyakarta.

Kelompok Pemuda

Di DIY sudah lama dikenal dengan keberadaan “geng” yang menjadi wadah aktualisasi anak muda. Ada banyak “geng” yang sudah lama eksis di Yogyakarta hingga saat ini, seperti: Joxin, Tentara Langit, Q-zruh. Geng-geng tersebut saling bersaing, baik dalam luas wilayah, pengaruh, maupun kepentingan ekonomi. Dalam konteks Orde Baru, banyak geng pada akhirnya bertransformasi menjadi underbouw partai dan sering dimanfaatkan dalam pemilu. Geng-geng yang ada mengidentifikasi diri pada dua kutub, kutub merah (PDIP) dan kutub hijau (PPP). Persaingan antara geng merah dan geng hijau tetap eksis hingga saat ini dan event pemilu mengaktivasi kembali persaingan tersebut.

Underbouw partai di DIY terutama PDIP dan PPP berbeda dengan corak umum yang ada. Corak umum dari organisasi kolateral merupakan bentukan dari partai politik secara top down untuk kepentingan penggalangan suara dalam pemilu (). Namun, di DIY, underbouw partai yang ada saat ini tidak mengikuti corak umum tersebut. Geng seperti Joxin, Tentara Langit, Q-zruh merupakan organisasi anak muda yang secara organik tumbuh dan berkembang. Konteks sosial, ekonomi, dan politik pada masa orde baru dan reformasilah yang “memaksa” geng-geng tersebut berafiliasi dengan partai. Salah satu tujuan mereka berafiliasi dengan partai adalah untuk menjaga survavilitas dan meningkatkan daya saing terhadap geng lain.

Kelompok Perempuan

Selain anak muda, hal yang menarik adalah aktivisme perempuan dalam pemilu 2019. Aktivisme perempuan dalam pemilu 2019 seringkali diwadahi dalam frasa “emak-emak”. Sama seperti halnya *underbouw* partai, temuan dalam FGD menunjukkan bahwa gerakan emak-emak merupakan gerakan organik dari bawah.

Kemunculan gerakan emak-emak dalam pemilu tidak terlepas dari faktor figur kandidat dan kehadiran media sosial. Gerakan emak-emak banyak muncul di kubu pasangan calon 02 karena faktor Sandiaga Uno sebagai kandidat. Sandiaga Uno yang dianggap muda dan rupawan mampu menarik perhatian emak-emak dan menggerakannya dalam pemilu. Selain itu, kehadiran media sosial terutama facebook dan instagram yang banyak digunakan oleh emak-emak, juga menjadi pendorong aktivisme emak-emak. Sifat emak-emak yang suka membagikan foto dan video dalam setiap momen pemilu, mengamplifikasi popularitas kandidat. Partisipasi pemilih seperti emak-emak ini dikenal militan dalam mendukung kandidat baik dalam proses kampanye maupun dalam preferensi pilihan.

Istilah emak-emak itu sudah menjadi gerakan, bukan hanya sebutan. Jadi kalau dibilang emak-emak sudah tahu ini, ini kira kira dari golongan (pendukung kandidat) yang mana, gitu. Sehingga perlu dilihat gerakan yang (berbasis) gender khususnya gerakan yang emak- emak, ini lebih radikal ini daripada yang gerakan yang sebelumnya. Maksudnya lebih radikal (adalah) lebih mengakar, lebih kuat, dan lebih partisipatif karena itu tidak minta kaos, kalau laskar masih minta kaos (Dharma Setiawan, Ketua Badan Pemenangan Daerah Paslon 02)

[Gerakan buzzer] itu kalah masif sama gerakan emak-emak. Emak emak ini tidak ada komandan cyber-nya. Itu benar benar partisipasi individu dan “hobi” yang senang selfie kirim ke medsos dan instagram itu betul betul cocok buat mereka. (Dharma Setiawan, Ketua Badan Pemenangan Daerah Paslon 02)

Jenis dan Sistem Pemilu: Pemilu Legislatif Proporsional Terbuka

Faktor yang mempengaruhi kualitas partisipasi selanjutnya adalah jenis dan sistem pemilu. Temuan FGD menunjukkan bahwa tingkat persaingan dalam pemilihan legislatif lebih tinggi dibandingkan pemilihan eksekutif. Hal ini tidak terlepas dari kompleksitas pemilu dan penggunaan sumber daya oleh kandidat. Pemilihan legislatif dinilai memiliki kompleksitas yang tinggi karena kandidat tidak hanya bersaing dengan kandidat lain di luar partai namun juga kandidat lain di internal

partai. Untuk mengalahkan pesaingnya, baik dari luar maupun internal partai, kandidat mengerahkan sumber daya yang dimiliki baik ekonomi maupun sosial. Salah satu sumber daya penting kandidat adalah kepemilikan dan penggunaan “geng”. Geng tertentu bahkan sangat melekat dengan kandidat tertentu dibandingkan dengan partai politik. Penguasaan geng oleh kandidat ini menjadi penting tidak terlepas dari sistem pemilu proporsional terbuka yang mengedepankan figur dan tidak bekerjanya mesin partai (Aspinall, 2014; Aspinall & Berenschot, 2019). Selain digunakan untuk kampanye dan konvoi, geng seringkali dimanfaatkan kandidat untuk memobilisasi suara dan intimidasi.

Menurut saya tinggal kedekatannya saja ya (antara kandidat dengan laskar). Kedekatan itu macam-macam, bisa kedekatan secara sikap, kedekatan karakter, termasuk kedekatan pendanaan. Jadi memang kalau fenomena ini yang bisa dibilang Laskar sampai 170 sekarang sudah tidak ada paling banyak 50 sudah hebat. (Bambang Praswanto, Ketua Tim Kampanye Daerah Paslon 01)

Penutup

Setidaknya ada dua hal penting yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara pemilu terkait dengan partisipasi. Pertama, kuantitas partisipasi. DIY selalu menunjukkan trend kuantitas partisipasi yang baik, dari awal diterapkannya pemilihan langsung hingga sekarang. Hal ini tidak terlepas dari modal sosial dan pengetahuan yang ada di DIY. Modal sosial masyarakat yang terkenal kuat secara tidak langsung mendorong partisipasi masyarakat. Akan ada sanksi sosial yang bekerja jika ada anggota masyarakat yang tidak datang di TPS. Selain itu, tingginya kuantitas partisipasi didukung oleh banyaknya lembaga pendidikan yang ada di Yogyakarta. Iklim akademik yang kondusif turut mendukung stabilnya kuantitas partisipasi. Penyelenggara pemilu harus memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk menjaga capaian yang sudah bagus hingga saat ini.

Kedua, kualitas partisipasi. Kualitas partisipasi seringkali tidak mendapat perhatian karena semua pihak cenderung fokus untuk menaikkan kuantitas partisipasi. Bahkan KPU RI sebagai penyelenggara pemilu selalu membuat target di setiap pemilu yang harus dipenuhi oleh KPU di level daerah. Padahal, kualitas partisipasi juga tidak kalah penting. Penyelenggara pemilu setidaknya harus memperhatikan faktor

demografis dan tingkat kompetisi pemilu yang melekat pada jenis dan sistem pemilu yang digunakan. Partisipasi yang berkualitas akan berkorelasi positif dengan kualitas penyelenggaraan pemilu. Dampak luas dari partisipasi dan pemilu yang berkualitas adalah demokrasi yang berkualitas.

Bab 3: Potensi Pelanggaran dan Konflik Horizontal

Pada pemilu serentak pemilihan presiden dan legislatif 2019, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) baik pusat maupun daerah, yaitu Yogyakarta, memberikan pernyataan bahwa Yogyakarta menduduki peringkat pertama untuk kategori daerah rawan konflik. Pernyataan tersebut cukup mengkhawatirkan banyak pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga penyelenggara pemilu di level daerah. Kekhawatiran yang muncul ialah terkait risiko yang dapat mengganggu kelancaran proses Pemilu. Menurut hasil wawancara dengan salah satu informan, pernyataan tersebut membuat berbagai pihak terkait menjadi 'siaga' dan memunculkan 'ketegangan' tersendiri selama durasi Pemilu 2019. Satu sisi bahwa kesiagaan itu penting untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diharapkan, tapi di sisi lain, hal tersebut dapat memunculkan ketegangan antar pihak secara langsung maupun tidak langsung, contohnya ialah antara KPU dan Bawaslu.

Dalam isu konflik horizontal pada konteks masyarakat Yogyakarta, salah satu tantangan yang menghadang penyelenggara Pemilu dan pihak berwajib adalah pengelolaan laskar-laskar akar rumput yang kerap menjadi kelompok utama pemicu konflik horizontal. Kelompok-kelompok tersebut tersebar keberadaannya, mayoritas tidak terdaftar secara resmi, dan umumnya bersifat temporer. Kelompok-kelompok ini dapat dengan mudah terbentuk dengan beranggotakan beberapa orang saja. Kelompok-kelompok kecil ini kemudian berafiliasi dengan kelompok lain, sehingga membentuk semacam solidaritas. Ada juga kelompok yang menginduk pada kelompok yang sudah besar dan mapan.

**DATA PETA POTENSI KERAWANAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019
WILAYAH PROVINSI DIY**

NO	WILAYAH	BENTUK KERAWANAN	LOKASI RAWAN KONFLIK	MASALAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I KOTA YOGYAKARTA					
1	Kec. Ngampilan	Bentrok simpatisan GPK Khittah dan PDI Perjuangan	a. Simpang 4 Brantan/Ngabean) b. Jembatan Serangan Ngampilan. c. Simpang 4 Taman sari (Kel. Notoprajan)	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. Perebutan lahan parkir.	a. GPK Khittah adalah Underbow PPP yang tidak mengakui kepemimpinan PPP yang sah.
2	Kec. Pakualaman	Bentrok simpatisan GPK Khittah dan PDI Perjuangan	a. Simpang 4 Gayam b. Simpang 4 Hayam Wuruk. c. Jl. Juminahan	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. Perebutan lahan parkir.	b. Kerawanan bentrok simpatisan karena ingin mengangkat eksistensi kelompok maupun permasalahan individu
3	Kec Danurejan	Bentrok simpatisan GPK Khittah dan PDI Perjuangan	a. Simpang 4 RM. Numani, Lempuyangan. b. Simpang 4 Melia purosani, Suryatmajan c. Jl. Mataram d. Jl. Sutomo e. Jl. Hayam wuruk	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. Perebutan lahan parkir.	c. Lokasi-lokasi tersebut dalam pemilu sebelumnya pernah terjadi gesekan antar pok.
4	Kec. Umbulharjo	Bentrok simpatisan GPK Khittah dan PDI Perjuangan	a. Simpang 4 SGM b. Simpang 4 Gambiran c. Jl. Veteran d. Sp 4 Wirosabab e. Jl. Nitikan.	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. Perebutan lahan parkir.	

1	2	3	4	5	6
				e. Eksistensi massa / kelompok. f. Perbedaan pendapat.	
4	Wil Kab. Sleman	Bentrok Simpatisan PDI-P dengan GPK	Sebagian besar wilayah Sleman yang merupakan basis laskar PDI-P (Tentara langit, BMI) dan PPP (GPK)	a. Rivalitas simpatisan kader, perseteruan kedua kelompok yang cukup lama telah menimbulkan korban.. b. Eksistensi massa / kelompok.	Secara organisasi PDI-P dan PPP mendukung Capres Jokowi - Ma'ruf Amin, arus bawah keduanya terjadi perseteruan blm ada kesepakatan damai
5	Wil Kab. Sleman	Bentrok Simpatisan PDI-P dengan PAN	Sebagian besar wilayah Sleman yang merupakan basis laskar PDI-P (Tentara langit, BMI) dan PAN	a. Rivalitas simpatisan kader, perbedaan dukungan kedua parpol dari tingkat kabupaten saat Pilkada 2015 dan Pilpres 2019.. b. Eksistensi massa / kelompok.	
6	Wil Kab. Sleman	Bentrok Simpatisan PDI-P dengan Partai Gerindra	Sebagian besar wilayah Sleman yang merupakan basis laskar PDI-P (Tentara langit, BMI) dan Partai Gerindra	a. Rivalitas simpatisan kader, perbedaan dukungan kedua parpol dari tingkat kabupaten sampai pusat saat Pilpres 2014 maupun 2019. b. Eksistensi massa / kelompok. c. Kedua parpol tingkat pusat terjadi perbedaan pendapat antara Pemerintah (PDI-P) dengan oposisi (Partai Gerindra)	

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> b. Bentrok simpatisan GPK Khittah dan GPK PPP c. Bentrok Simpatisan PDI Perjuangan oleh simpatisan FPI Jateng-DIY 		<ul style="list-style-type: none"> d. Dualisme dukungan simpatisan massa kader terhadap partai politik e. Eksistensi massa / kelompok. f. Perbedaan pendapat. 	
2	Kec Godean	<ul style="list-style-type: none"> a. Bentrok simpatisan GPK Khittah dan PDI Perjuangan b. Bentrok simpatisan GPK Khittah dan GPK PPP 	Desa Sidoarum	<ul style="list-style-type: none"> a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. perbedaan dukungan Capres / Cawapres. d. Dualisme dukungan simpatisan massa kader terhadap partai politik e. Eksistensi massa / kelompok. f. Perbedaan pendapat. 	
3	Kec Ngaglik	<ul style="list-style-type: none"> a. Bentrok simpatisan GPK Khittah dan PDI Perjuangan b. Bentrok simpatisan GPK Khittah dan GPK PPP 	sepanjang Jl Kaliurang GPK pimpinan Mustaqim yang merupakan pendukung H Farhan Hariem	<ul style="list-style-type: none"> a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. perbedaan dukungan Capres / Cawapres. d. Dualisme dukungan simpatisan massa kader terhadap partai politik 	

1	2	3	4	5	6
		dengan massa laskar GPK pada pemilu 2014.			b. Pengrusakan dan pencurian APK
8	Kecamatan Bantul	Bentrok simpatisan GPK Khittah dan GPK PPP	Kantor DPC PPP Bantul alamat JL WR. Supratman, No. 8, Depok, Bantul, Kec. Bantul, Bantul	<ul style="list-style-type: none"> a. Dualisme dukungan simpatisan massa kader terhadap partai politik b. Eksistensi massa/kelompok - 	Rawan konflik antara GPK Khittah dan GPK PPP
III KAB. KULONPROGO					
1	Kecamatan Kokap	Bentrok simpatisan GPK Khittah (GeMaX) dengan GPK PPP	Seluruh wilayah Kulonprogo	<ul style="list-style-type: none"> a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. Perebutan lahan parkir. 	
2	Kecamatan Wates	Bentrok simpatisan GPK PPP dan Ormas PP	Seluruh Wilayah Kec. Wates, Kab. Kulonprogo	<ul style="list-style-type: none"> c. Perebutan lahan parkir d. Permasalahan pribadi kader yang berujung permasalahan antar kedua kelompok. 	Pernah terjadi perkelahian pada 31 Mei 2016
3	Kecamatan Lendah & Galur	Perebutan dukungan massa Pilpres	Seluruh wilayah Kecamatan Galur dan Lendah	<ul style="list-style-type: none"> a. Kedua wilayah merupakan basis massa PAN dan PKS b. Militansi terhadap partai tersebut cukup tinggi. 	
IV KAB. SLEMAN					
1	Kec. Gamping	<ul style="list-style-type: none"> a. Bentrok simpatisan GPK Khittah dan PDI Perjuangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Desa Ambarketawang b. Dsn Mlangi Nogotirto c. Desa Balecatur 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. perbedaan dukungan Capres / Cawapres. 	

1	2	3	4	5	6
		b. Basis masa GPK PPP dengan simpatisan PDI Perjuangan			
3	Kecamatan Imogiri	Terdapat basis massa PDIP Jas Merah dan laskar GPK Mataram	Desa Sriharjo Imogiri	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok	a. Perusakan APK b. Konflik simpatisan PDIP dengan GPK
4	Kecamatan Pleret	Sejarah konflik masa PPP yang tergabung dalam laskar GPK Arafat pimpinan Sdr. Yanto dengan PDIP	Wonokromo	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok	Konflik / Penghadangan terhadap simpatisan partai lain pada saat kampanye terbuka
5	Kecamatan Jetis	Wilayah Dusun Blawong, Kembangsono dan Bembem Trimulyo Jetis merupakan basis massa GPK	Jalan Imogiri Timur sepanjang Desa Trimulyo Setis	a. Rivalitas. b. Eksistensi massa/kelompok	Konflik / penghadangan simpatisan peserta kampanye
6	Kecamatan Kasihan	Terdapat sejarah konflik antara anggota FJI dengan simpatisan PDIP di Dsn. Padokan Tirtonimolo	Dsn. Padokan Desa Tirtonimolo	a. Rivalitas b. Eksistensi massa/kelompok	Konflik, Penganiayaan, dan Pengrusakan
7	Kecamatan Pandak	Terdapat sejarah konflik simpatisan laskar kalimosodo PDIP	Jl Srandakan Dsn Tegallayang Caturharjo Pandak	Eksistensi massa/kelompok	a. Konflik massa simpatisan PDIP dengan laskar GPK

1	2	3	4	5	6
11	Kec Gondokusuman	Bentrok simpatisan GPK Khittah dan PDI Perjuangan	a. Simpang 4 Galeria Mall b. Jl. UripSumoharjo.	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. Perebutan lahan parkir.	a. GPK Khittah adalah Underbow PPP yang tidak mengakui kepemimpinan PPP yang sah.
12	Kec Gedongtengen	Bentrok simpatisan GPK Khittah dan PDI Perjuangan	a. Jl. LetjenSuprpto b. Simpang 4 Jlagran	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. Perebutan lahan parkir.	b. Kerawanan bentrok simpatisan karena ingin mengangkat eksistensi kelompok maupun permasalahan individu
13	Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta	Bentrok simpatisan GPK Khittah dan GPK PPP	Seluruh Wilayah Kota Yogyakarta	a. Dualisme dukungan simpatisan massa kader terhadap partai politik b. Eksistensi massa/kelompok.	c. Lokasi-lokasi tersebut dalam pemilu sebelumnya pernah terjadi gesekan antar pok.
KAB. BANTUL					
1	Kecamatan Sewon	Terdapat Basis massa PDI Perjuangan banteng umbaran koordinator Sdr. Rumawan.	Jln. Bantul Km. 5 Dsn. Kweni Panggungharjo Sewon Bantul.	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok.	Penghadangan terhadap simpatisan partaii PDI.P pada saat kampanye terbuka
2	Kecamatan Banguntapan	a. Basis pendukung sepakbola Brajamusti, yang berhaluan politik ke PDIP	a. Dsn. Singosaren, Dsn. Modalan Desa Singosaren b. Wiyoro, Karsuli, Potorono.	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok	Penghadangan terhadap simpatisan partai lain pada saat kampanye terbuka

1	2	3	4	5	6
5	Kec. Jetis	Bentrok simpatisan GPK Khittah dan PDI Perjuangan	a. Simpang 3 A Takrip b. Jl. Sudirman (Gondolayu dan Jogoyudan) c. Jl. Prof. Dr. Sadjito. d. Jl. P. Diponegoro (depan Pasar Karanggan dan Kp. Penumping.) e. Jl. Bumijo.	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. Perebutan lahan parkir.	a. GPK Khittah adalah Underbow PPP yang tidak mengakui kepemimpinan PPP yang sah. b. Kerawanan bentrok simpatisan karena ingin mengangkat eksistensi kelompok maupun permasalahan individu c. Lokasi-lokasi tersebut dalam pemilu sebelumnya pernah terjadi gesekan antar pok.
6	Kec. Mergangsan	Bentrok simpatisan GPK Khittah dan PDI Perjuangan	a. Jl. Taman Siswa b. Depan museum perjuangan. c. Jl. Brigjen Katamso d. Simpang Pasar Telo. e. Super Indo Jl. Paris.	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. Perebutan lahan parkir.	
7	Kec. Kotagedhe	Bentrok simpatisan GPK Khittah dan PDI Perjuangan	a. Simpang Warungboto/Jl. Pelem sari b. Simpang 4 Gedongan. c. Simpang Rejowinangun.	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. Perebutan lahan parkir.	
8	Kec Mantrijeron	Bentrok simpatisan GPK Khittah dan PDI Perjuangan	a. KampungCuwiri b. Jl. Jogokariyan	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. Perebutan lahan parkir.	
9	Kec Wirobrajan	Bentrok simpatisan GPK Khittah dan PDI Perjuangan	Simpang Bugisan	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. Perebutan lahan parkir.	
10	Kec Tegalrejo	Bentrok simpatisan GPK Khittah dan PDI Perjuangan	a. Jl. HOS Cokroaminoto b. Jl. Tompeyan	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa/kelompok. c. Perebutan lahan parkir.	

1	2	3	4	5	6
V	KAB. GUNUNG KIDUL				
	a. Kec. Wonosari (Desa Kepek, Desa Baleharjo dan Desa Piyaman) b. Kec. Playen (Dusun Siyono Wetan)	Bentrok Simpatisan massa pendukung	a. Kec. Wonosari (Desa Kepek, Desa Baleharjo dan Desa Piyaman) b. Kec. Playen (Dusun Siyono Wetan)	a. Rivalitas simpatisan kader. b. Eksistensi massa / kelompok. c. Dualisme dukungan simpatisan massa kader terhadap partai politik (PPP Kubu Romahumzy dan Sukri Fadholi) d. Eksistensi massa / kelompok.	

*Tabel. Peta Rawan Konflik dalam Pilpres 2019 di DIY
Sumber: Direktorat Intelijen Keamanan, Polda DIY*

Berdasarkan hasil FGD, umumnya kelompok laskar di atas terbentuk atas dasar kebutuhan ekonomi atau istilah yang sering disebut ialah 'kebutuhan perut'. Momentum Pemilu menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan aktivitas guna menghasilkan profit ekonomi. Melalui observasi oleh peneliti, kelompok laskar ini akan menempel pada partai politik tertentu atau calon legislatif yang dirasa menguntungkan bagi mereka. Mereka bertindak menjadi 'agen' bagi partai atau calon legislatif tersebut untuk mendulang suara selama Pemilu. Pada akhirnya,

jumlah aktor atau kelompok laskar yang cukup banyak dengan berbagai kepentingannya masing-masing, sedangkan ruang yang diperebutkan bersifat terbatas, maka muncullah gesekan sosial yang memicu munculnya konflik sosial yang lebih massif.

Langkah-langkah strategis kemudian dilakukan untuk meredam potensi konflik yang kerap dipicu oleh gesekan antar massa laskar-laskar dan kelompok akar rumput yang identik sebagai pendukung dua partai besar yang bersitegang di Yogyakarta, yakni PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan). Berdasarkan hasil FGD (lihat kutipan di bawah ini), salah satu alternatif yang dilakukan untuk meredam konflik ialah dengan penyelenggaraan forum bersama.

Pemuda dari Kesbang, dari Polres, kemudian dari KPU coba mengumpulkan laskar-laskar yang itu bukan dari peserta Pemilu, dalam arti mereka bergerak di bawah, tapi cukup signifikan dalam mengelola konflik. [HD, 2019]

Pertemuan atau forum bersama tersebut dinilai cukup berpengaruh dalam mengelola ketegangan yang terjadi di level akar rumput. Forum tersebut mempertemukan berbagai aktor dengan tujuan untuk menjalin komunikasi, sehingga memiliki interaksi yang positif. Harapannya, hal tersebut dapat mereduksi ketegangan yang selama ini mudah tersulut oleh beberapa faktor yang beskala kecil maupun besar. Hanya saja, pertemuan bersama ini dinilai belum efektif dalam merangkul semua kelompok atau laskar yang ada di Yogyakarta. Kondisi tersebut disebabkan oleh jumlah kelompok yang hingga saat ini tidak ada basis data yang dapat mendukung pengelolaannya. Pengembangan basis data ini juga terkendala oleh sifat dari kelompok tersebut yang tidak permanen. Satu kala tiba-tiba muncul dan menjamur, tapi di waktu lain bisa jadi berkurang karena melebur atau bahkan menghilang.

Sejauh ini, beberapa kejadian yang melibatkan laskar dan memiliki unsur kekerasan serta menyulut gesekan terjadi di beberapa titik di Yogyakarta. Pada awal tahun 2019, ada tindakan provokasi 'penyerangan' terhadap masjid Jogokaryan oleh beberapa oknum dari salah satu partai yang bersitegang. Dilansir dari Tempo.com (2019), masjid Jogokaryan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 didatangi sekelompok orang dengan atribut PDI-Perjuangan. Bentrok terjadi antara kelompok

tersebut dengan Pemuda Jogokaryan. Kejadian itu sempat mengagetkan berbagai pihak karena sesuai kesepakatan pada tahun 1999 bahwa massa pendukung PDI-Perjuangan dilarang untuk melakukan kampanye atau konvoi di area Jogokaryan.

Berdasarkan wawancara dengan informan, sudah menjadi rahasia umum jika perselisihan yang kuat terjadi di Yogyakarta ialah antara laskar pendukung PDI-Perjuangan dengan laskar pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Salah satu narasumber dalam FGD yang merupakan mantan Pengawas Pemilu 2019 menuturkan bahwa benturan-benturan antar laskar memang acapkali terjadi. Namun demikian, pada dasarnya hal itu tidak terkait secara langsung dengan penyelenggaraan Pemilu. Menurut hasil penelusurannya, bentrokan yang terjadi selama Pemilu 2019 lebih pada bertemunya dua kelompok secara kebetulan atau tanpa sengaja (*accidental*) yang diikuti oleh tersulutnya emosi dari kedua belah pihak, sehingga konflik fisik pun tidak dapat dihindari terjadi.

Apabila dicermati secara seksama, konflik horizontal yang terjadi di Yogyakarta yang terkait Pemilu 2019 memiliki dua hal yang penting untuk mendapat perhatian lebih dalam. Pertama, elemen-elemen laten, di mana konflik horizontal dipicu oleh peristiwa dan persoalan sehari-hari yang tidak berkaitan langsung dengan pemilu. Misalnya, perebutan lahan parkir. Kedua, faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan pemilu yang di dalamnya termasuk perebutan basis massa dan kursi parlemen. Kedua hal tersebut pada dasarnya terkait dengan sejarah dan aktor yang terlibat di dalamnya. Dari aspek sejarah, perubahan titik-titik rawan dan titik-titik kekuasaan laskar dapat dilihat melalui beberapa pembagian waktu, misalnya sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, era tahun 1955, era tahun 1965, era reformasi, dan seterusnya. Pada dasarnya mengikuti dinamika ekonomi-politik yang terjadi di Indonesia. Hanya saja dalam konteks Yogyakarta, dinamika di atas akan menarik untuk dipetakan dengan melihat bagaimana partai-partai politik bertransformasi pada era-era di atas. Selanjutnya, dari aspek aktor yang terlibat, pemetaan konflik horizontal di Yogyakarta akan menarik dengan melihat mobilitas horizontal dari aktor-aktor yang memiliki power atas massa laskar. Ada dua hipotesa yang bertentangan terkait aktor ini, yaitu: 1) daerah kekuasaan laskar muncul dan berpindah dengan mendasarkan pada mobilitas si aktor utama yang berperan sebagai pimpinan; dan 2) munculnya daerah-daerah kekuasaan tidak

bergantung pada eksistensi aktor utama.

Selanjutnya, Terminal Serangan sebagai ruang 'pertemuan' kedua basis massa menyingkap elemen-elemen laten atas gesekan antar kelompok yang bersitegang. Isu yang muncul dari Serangan sebagai titik sentral adalah sentimen ekonomi-politik perebutan lahan 'mata-pencapaian.' Hal ini diungkapkan oleh salah satu narasumber FGD yang menjabat sebagai ketua laskar dan yang sekian lama menjadi figur penting dalam jejaring aktor di antara kelompok-kelompok kepentingan, sebagai berikut:

Menurut saya gak usah disebutkan pun udah tahu, terutama yang sekarang yang baru itu adalah memang perempatan Serangan. Itu adalah memang sebenarnya bukan apa ya, sebenarnya bukan masalah aktor atau bukan masalah lahan dan sebagainya. Memang lahan ada lah sedikit karena berseberangan ataupun bersebelahan dan memang waktu itu kita memang ada sedikit gesekan dari sebelah. Akhirnya ya dikuasailah gitu. Lebih ke generasi sebenarnya. Per generasi pergeseran. Memang lahan memang. Kalau dipikir memang permasalahan semuanya di lahan. Gitu ya. [RK, Ketua Laskar]

Pernyataan tersebut menyingkap elemen laten bahwa Pemilu secara umum, dan masa kampanye secara khusus dipergunakan oleh kelompok yang bersitegang sebagai momentum eskalasi konflik laten yang 'telah' ada di tengah masyarakat. Seperti yang juga diungkapkan oleh salah satu anggota Bawaslu, bahwa Serangan bukan ruang hampa yang serta merta tidak punya nilai makna. Ketika Serangan sebagai ruang yang mempunyai nilai ekonomi, kemudian ditambah dengan momentum politik, maka di sanalah terjadi perebutan.

Pola konflik yang berasosiasi dengan wilayah tertentu di Yogyakarta bukan merupakan fenomena baru. Kecenderungan benturan yang terpusat pada satu titik terjadi juga pada era orde baru, tepatnya di dekade 1980an di mana daerah rawan terkonsentrasi di daerah Mergangsan.

Itu yang rawan Jalan Sisingamangaraja dulu ya, yang paling sering konflik antar pendukung [...] Tapi gak tahu sejak kapan, kemudian bergeser ke Serangan itu mungkin sejak Reformasi, pasca Reformasi ini. Kalau saya melihat ada pergeseran aktor ya yang menjadi rujukan di situ yang memang kuat di situ, kemudian memang arahnya ke daerah- daerah sekitar situ [...] Dan saya terasa melihatnya karena aktor itu ya, sementara kalau dulu mungkin aktornya yang kuat, patron laskarnya itu ada di Kotagede atau di Karangajen dan sebagainya. [NO, Anggota KPU]

Relasi antar aktor penting yang memiliki kuasa signifikan pada kubu yang berseteru, dengan ini, perlu dilihat sebagai faktor utama yang memiliki andil dalam perubahan dinamika konflik horizontal terkait pemilu di Yogyakarta. Namun demikian, pergeseran pusat gesekan tidak hanya berarti pergeseran relasi aktor atau semata karena perpindahan aktor dari satu lokasi ke lokasi lain, melainkan hasrat perluasan wilayah yang muncul dari kelompok yang bersitegang. Hal ini disampaikan RK (Ketua Laskar) sebagai satu pola 'pergerakan' yang ditempuh oleh kelompok kepentingan.

Yang dibilang bergeser itu, kalau menurut saya tidak masalah di dalam aktornya. Melainkan posisi kekuatan dari merah di situ kita akan menggeser di situ. Itu awal mula kita berfikir di situ. Bukan masalah aktor sebenarnya. Dan waktu itu saya juga terlibat di situ dalam kondisi kepengurusan, istilahnya orang-orang yang oknum di situ ataupun yang disebut sekarang "sebelah" kita lah. Saya membentuk di situ, saya waktu itu menjabat jadi Sekjen di situ. [RK, Ketua Laskar]

Pergeseran ruang dan 'perluasan' aktor menyingkap elemen laten dalam dinamika sejarah konflik horizontal pemilu di Yogyakarta, bahwa gesekan yang terjadi pada masa-masa kampanye tidak semata termanifestasi oleh persoalan-persoalan langsung elektoral. Namun, benturan yang terlihat pertama-tama disebabkan juga ketegangan atas perebutan lahan ekonomi sehari-hari. Kedua, hasrat untuk memperluas wilayah dengan menggeser daerah 'kekuasaan' pihak yang bersebrangan; di mana perluasan tersebut juga berdampak pada akumulasi lahan 'mata pencaharian.' Meskipun demikian, hal ini tidak lalu berarti bahwa konflik horizontal yang menyebar tidak memiliki hubungan langsung dengan urusan-urusan pemilu, seperti yang diungkapkan oleh NO (Anggota KPU) bahwa '*...memang tidak hanya kemudian persoalan di lapangan yang tadi disebutkan, ada sedikit mungkin persoalan ekonomi, aktor dan sebagainya. Namun juga kalau dalam Pemilu memang itu terkait dengan perebutan kursi, perolehan suara, dan lain sebagainya.*'

Elite politik lokal dan figur-figur partai kemudian melihat laskar dan kelompok akar rumput sebagai massa yang dapat dimobilisasi untuk mendulang suara. Hal ini terlihat secara kasat mata bahwa laskar tertentu merupakan *underbouw* atau memiliki asosiasi dengan partai tertentu. Konflik laten yang lebih didasari oleh sentimen ekonomi politik, kemudian 'dimanfaatkan oleh mereka [Calon legislatif dan elite partai] lima tahun sekali' (RK, Ketua Laskar). Pada praktik operasionalnya,

laskar-laskar tersebut dimobilisasi oleh caleg dan elite partai untuk kepentingan mempengaruhi elektoral, seperti yang dikisahkan oleh AU (anggota Laskar), bahwa *'Ini (laskar) dilihat oleh calon, terutama DPR RI. Kalau saya melihat fenomena bentuk Pemilu yang terbuka, kemudian caleg DPR RI itu sudah melihat potensi, kalau saya bisa berkoordinasi dengan laskar 10 itu, berarti 1 laskar misalnya 2000 x 10, berarti sudah 20.000 massa konkrit. Dia bisa mengakses suara itu dan itu digunakan ketika sebelum kampanye. Jadi, deklarasi-deklarasi yang kemudian itu bergesekan itu massanya kemarin, itu adalah sebelum kampanye.'* Meskipun kemudian, kecenderungan ini bersifat cair, dinamis, dan hanya berlangsung ketika pemilu bahwa *'Ini [merupakan] fenomena yang menyingkap bagaimana Laskar itu eksis dan penting diakui secara tidak langsung oleh aktor, oleh caleg ini, dan oleh parpol, ini menjadi entitas yang perlu diperhitungkan karena dia kadang bisa masuk parpol, kadang dia tidak bisa masuk parpol. Jadi ketika momentum pemilu, dia bisa kemudian mengorganisir diri untuk mandiri. Tapi ketika Pemilu, dia kemudian mengorganisir diri untuk kemudian bisa berkontribusi dengan patron baru, misalnya caleg itu'* (AU, anggota Laskar). Persoalan yang kemudian perlu dibongkar dalam relasi kuasa pengorganisasian laskar dalam pemilu adalah cara kerja jejaring aktor yang bergerak di dalamnya.

Jejaring aktor tersebut kemudian dapat dibagi lagi menjadi tiga lapisan. Pertama, lapisan elite partai dan calon legislatif yang memiliki kepentingan menjaga basis massa untuk perolehan suara. Kedua, pemimpin kelompok-kelompok akar rumput dan laskar sebagai lapisan tengah yang memiliki kepentingan ekonomi politik. Terakhir adalah anggota laskar yang secara umum beranggotakan anak muda yang memiliki 'kepentingan' atau hasrat eksistensi diri. Pada aras elit partai, terdapat persinggungan antara aktor nasional dan aktor lokal yang kemudian berkoordinasi dengan pemimpin laskar.

*Selain aktor, bahwa aktor lokal dan nasional ternyata di sana juga hadir. Ketika isu Pilpres kemudian juga berelasi dengan aktor lokal yang di sana, kalau kita bisa cermati ada mas F****, kemudian di atasnya lagi ada pak S*****, dan itu juga masuk tim kampanye Pilpres. [RA, Anggota Bawaslu]*

Di samping hubungan aktor elite dan middleman yang terlihat dan dapat secara relatif diduga relasinya, ada beberapa relasi yang tidak dapat diidentifikasi secara gamblang dan cenderung abu-abu karena berkaitan dengan aktor utama yang sama

sekali tidak muncul di lapangan. RK (ketua Laskar) menyebutnya sebagai 'monster' yang sebetulnya memiliki andil paling besar dalam mengorkestrasi benturan-benturan yang terjadi ketika masa kampanye, bahwa '*sebenarnya aktor itu bisa dikatakan itu sebagai pion pak, bisa digerakkan dia, bisa dikasih tahu [...] nah ini monsternya siapa. Ya nuwun sewu, sekarang yang mau dibilang yang di perempatan Serangan itu, sebenarnya kan jangan itu, istilahnya duduk itu jangan itu. Nah ini monster yang di sini siapa?*' (RK, Ketua Laskar). Aktor yang sulit diidentifikasi ini yang kemudian perlu didalami lebih lanjut sebagai pintu masuk untuk meredam potensi konflik horizontal terkait pemilu di Yogyakarta.

Pada aras pemimpin laskar atau middleman, pengorganisasian laskar menjadi poin yang menyingkap banyak hal termasuk lapisan-lapisan kepentingan yang lebih rumit baik antara laskar dalam satu kubu, antara anggota laskar dalam satu kelompok, dan antar laskar yang bersebrangan pandangan politik. Tugas pemimpin laskar sebagai middleman inilah yang kemudian krusial menjadi ujung tombak orkestrasi lapangan.

...Cuman cara berpolitiknya ataupun ini semua bisa dibeli dan jujur saya selalu menegaskan kepada anggota saya semua, memang luput sih gak banyak. Cuma saya menegaskan kalau memang posisi yang seperti ini bolehlah kalian bermain, tapi kalau posisi yang satu komando kami, janganlah kalian bermain. Jadi kita bisa mengolah di situ sebenarnya. Paling posisi-posisi yang kita meleset, area-area yang kita kurang kuat lah cuman di situ. Tapi kalau posisi-posisi yang kuat, kita bisa bermain di situ. [RK, Ketua Laskar].

Di lapisan yang paling terlihat, anggota laskar kemudian menjadi gambaran umum konflik horizontal yang terjadi di Yogyakarta. Formasi individu di dalamnya tidaklah tunggal dan berisi berbagai macam kepentingan seperti yang diutarakan oleh RK (ketua Laskar) bahwa

kepengurusan membawahi beberapa laskar ini, dan beberapa laskar ini membawahi anak buahnya, anak buahnya masih banyak di bawahnya lagi. [...] Ada beberapa kepentingan-kepentingan sendiri, betul. Ada beberapa permasalahan masa lalu, betul. Ada beberapa permasalahan yang sangat istilahnya dendam lama dan sebagainya dan menurut saya masalah lahan dan sebagainya.

Konflik laten dan kepentingan berlapis inilah yang kemudian dimobilisasi untuk kepentingan elektoral dengan kaderisasi dan regenerasi anggota laskar yang cukup terstruktur.

Itu sudah ada tanda kutip “pembibitan” anak-anak muda yang membentuk suatu kumpulan, istilahnya geng yang berafiliasi dengan partai-partai yang sebelum ada 5 tahunan ini memang sudah ada gesekan dan dipakai untuk (tidak jelas) 5 tahunan, justru mereka yang dompleng “aku nek ra ijo, ora”, “nek ra abang, ora.” Ketika mereka bertemu, ya udah selesai. [AU, anggota Laskar]

Pada titik inilah, hubungan antara elemen laten dan manifestasi konflik horizontal dapat terlihat bahwa ketegangan yang telah terjadi antar kelompok kemudian digerakkan oleh kepentingan untuk merembut elektoral, sehingga gesekan yang selama ini hadir sehari-hari memiliki momentumnya dan mencuat ketika masa-masa pemilihan umum. Tantangan yang kemudian muncul adalah pengelolaan aktor-aktor yang telah terpetakan di atas dengan kerjasama berbagai pihak termasuk kepolisian dan penyelenggara pemilu.

Bab 4: Kerawanan Bencana

DIY merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana alam yang cukup tinggi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis yang dimiliki DIY. Sisi utara DIY dibatasi oleh Gunung Merapi, yang merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Sedangkan di sisi selatan, DIY dibatasi oleh garis pantai dari samudera hindia yang memanjang sepanjang wilayahnya. Selain itu, DIY secara vertikal dibelah oleh dua aliran sungai yang cukup besar yakni Kali Progo di sisi barat dan Kali Opak di sisi timur. Dua sungai utama tersebut kemudian bercabang membentuk sungai-sungai lain seperti Sungai Serang, Sungai Progo, Sungai Bedog, Sungai Winongo, Sungai Boyong-Code, Sungai Gajah Wong, Sungai Opak, dan Sungai Oyo.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), DIY, setidaknya ada tujuh jenis potensi bencana alam yang berkaitan dengan bahaya geologi yang meliputi:

- Bahaya alam Gunung Merapi, mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara, dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi;
- Bahaya gerakan tanah/batuan, dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara, dan barat, serta pada lereng Pegunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara, dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul.
- Bahaya banjir, terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul;
- Bahaya tsunami, berpotensi terjadi di daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul, khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30m dari permukaan air laut.
- Bahaya alam akibat angin berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta;

- Bahaya gempa bumi, berpotensi terjadi di wilayah DIY, baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (*subduction zone*) di dasar Samudra Hindia yang berada di sebelah selatan DIY. Selain itu secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami guncangan akibat gempa bumi.

**TABEL DAERAH RAWAN BENCANA ALAM
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Potensi Ancaman
1	Karang Sewu	Galur	Kulonprogo	Tsunami
2	Banaran	Galur	Kulonprogo	Tsunami
3	Kranggan	Galur	Kulonprogo	Tsunami
4	Nomporejo	Galur	Kulonprogo	Tsunami
5	Brosot	Galur	Kulonprogo	Tsunami
6	Pandowan	Galur	Kulonprogo	Tsunami
7	Tirta Rahayu	Galur	Kulonprogo	Tsunami
8	Banjararum	Kalibawang	Kulonprogo	Tanah Longsor
9	Banjarasri	Kalibawang	Kulonprogo	Tanah Longsor
10	Baniarharjo	Kalibawang	Kulonprogo	Tanah Longsor
11	Banjaroyo	Kalibawang	Kulonprogo	Tanah Longsor
12	Hargomulyo	Kokap	Kulonprogo	Tanah Longsor
13	Hargorejo	Kokap	Kulonprogo	Tanah Longsor
14	Hargowilis	Kokap	Kulonprogo	Tanah Longsor
15	Kalirejo	Kokap	Kulonprogo	Tanah Longsor
16	Hargotirto	Kokap	Kulonprogo	Tanah Longsor
17	Wahyuharjo	Lendah	Kulonprogo	Banjir
18	Bumirejo	Lendah	Kulonprogo	Banjir
19	Jatirejo	Lendah	Kulonprogo	Banjir
20	Sidorejo	Lendah	Kulonprogo	Banjir
21	Gulurejo	Lendah	Kulonprogo	Banjir
22	Ngentakrejo	Lendah	Kulonprogo	Banjir
23	Kembang	Nanggulan	Kulonprogo	Tanah Longsor
24	Banyuroto	Nanggulan	Kulonprogo	Tanah Longsor
25	Donomulyo	Nanggulan	Kulonprogo	Tanah Longsor
26	Wijimulyo	Nanggulan	Kulonprogo	Tanah Longsor
27	Tanjungharjo	Nanggulan	Kulonprogo	Tanah Longsor
28	Garongan	Panjatan	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
29	Pleret	Panjatan	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
30	Bugel	Panjatan	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
31	Kanoman	Panjatan	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
32	Depok	Panjatan	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
33	Boiong	Panjatan	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
34	Tayuban	Panjatan	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
35	Gotakan	Panjatan	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
36	Panjatan	Panjatan	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
37	Cerme	Panjatan	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
38	Krembangan	Panjatan	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
39	Tawang Sari	Pengasih	Kulonprogo	Tanah Longsor
40	Karangsari	Pengasih	Kulonprogo	Tanah Longsor
41	Kedungsari	Pengasih	Kulonprogo	Tanah Longsor
42	Margosari	Pengasih	Kulonprogo	Tanah Longsor
43	Pengasih	Pengasih	Kulonprogo	Tanah Longsor
44	Sendangsari	Pengasih	Kulonprogo	Tanah Longsor
45	Sidomulyo	Pengasih	Kulonprogo	Tanah Longsor
46	Kebonharjo	Samigaluh	Kulonprogo	Tanah Longsor
47	Baniarsari	Samigaluh	Kulonprogo	Tanah Longsor
48	Purwoharjo	Samigaluh	Kulonprogo	Tanah Longsor
49	Sidoharjo	Samigaluh	Kulonprogo	Tanah Longsor
50	Ngargosari	Samigaluh	Kulonprogo	Tanah Longsor
51	Gerbosari	Samigaluh	Kulonprogo	Tanah Longsor
52	Pagerharjo	Samigaluh	Kulonprogo	Tanah Longsor
53	Jangkaran	Temon	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
54	Sindutan	Temon	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
55	Palihan	Temon	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
56	Glagah	Temon	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
57	Kali Dengen	Temon	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
58	Plumbon	Temon	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
59	Kedundang	Temon	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
60	Demen	Temon	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
61	Kulur	Temon	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
62	Kaligintung	Temon	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
63	Temon Wetan	Temon	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
64	Temon Kulon	Temon	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
65	Kebonrejo	Temon	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
66	Janten	Temon	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
67	Karang Wuluh	Temon	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
68	Karang Wuni	Wates	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
69	Sogan	Wates	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
70	Kulwaru	Wates	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
71	Ngestiharjo	Wates	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
72	Bendungan	Wates	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
73	Triharjo	Wates	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
74	Giri peni	Wates	Kulonprogo	Tsunami & Banjir
75	Wates	Wates	Kulonprogo	Tsunami & Banjir

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Potensi Ancaman
76	Sidomulyo	Bambanglipuro	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
77	Mulyodadi	Bambanglipuro	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
78	Sumbermulyo	Bambanglipuro	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
79	Tamanan	Banguntapan	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
80	Jagalan	Banguntapan	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
81	Singosaren	Banguntapan	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
82	Wirokerten	Banguntapan	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
83	Jambidan	Banguntapan	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
84	Potorono	Banguntapan	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
85	Baturetno	Banguntapan	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
86	Banguntapan	Banguntapan	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
87	Trirenggo	Bantul	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
88	Sabdodadi	Bantul	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
89	Mangunan	Dlingo	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
90	Muntuk	Dlingo	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
91	Dlingo	Dlingo	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
92	Temuwuh	Dlingo	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
93	Jatimulyo	Dlingo	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
94	Terong	Dlingo	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
95	Selopamiro	Imogiri	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
96	Sriharjo	Imogiri	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
97	Kebonagung	Imogiri	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
98	Karangtengah	Imogiri	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
99	Girirejo	Imogiri	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
100	Karangtalun	Imogiri	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
101	Imogiri	Imogiri	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
102	Wukirsari	Imogiri	Bantul	Tanah Longsor, Gempa Bumi & Banjir
103	Patalan	Jetis	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
104	Canden	Jetis	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
105	Sumberagung	Jetis	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
106	Trimulyo	Jetis	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
107	Bangunjiwo	Kasih	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
108	Tirtonirmolo	Kasih	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
109	Ngestiharjo	Kasih	Bantul	Tsunami
110	Tirtoharjo	Kretek	Bantul	Tsunami
111	Parangtritis	Kretek	Bantul	Tsunami
112	Donotirto	Kretek	Bantul	Tsunami
113	Tirtosari	Kretek	Bantul	Tsunami
114	Tirtomulyo	Kretek	Bantul	Tsunami
115	Triwidadi	Pajangan	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
116	Sendangsari	Pajangan	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
117	Caturharjo	Pandak	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
118	Triharjo	Pandak	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
119	Gilangharjo	Pandak	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
120	Wijirejo	Pandak	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
121	Sitimulyo	Piyungan	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
122	Srimulyo	Piyungan	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
123	Srimartani	Piyungan	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
124	Wonokromo	Pleret	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
125	Pleret	Pleret	Bantul	Gempa Bumi & Banjir
126	Segoroyoso	Pleret	Bantul	Gempa Bumi
127	Bawuran	Pleret	Bantul	Gempa Bumi
128	Wonolelo	Pleret	Bantul	Gempa Bumi
129	Seloharjo	Pundong	Bantul	Gempa Bumi
130	Srihardono	Pundong	Bantul	Gempa Bumi
131	Gadingsari	Sanden	Bantul	Tsunami
132	Gadingharjo	Sanden	Bantul	Tsunami
133	Srigading	Sanden	Bantul	Tsunami
134	Murtigading	Sanden	Bantul	Tsunami
135	Argodadi	Sedayu	Bantul	Gempa Bumi
136	Argorejo	Sedayu	Bantul	Gempa Bumi
137	Argosari	Sedayu	Bantul	Gempa Bumi
138	Argomulyo	Sedayu	Bantul	Gempa Bumi
139	Pendowoharjo	Sewon	Bantul	Gempa Bumi
140	Timbulharjo	Sewon	Bantul	Gempa Bumi
141	Bangunharjo	Sewon	Bantul	Gempa Bumi
142	Panggungharjo	Sewon	Bantul	Gempa Bumi
143	Poncosari	Srandakan	Bantul	Gempa Bumi
144	Trimurti	Srandakan	Bantul	Tsunami

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Potensi Ancaman
145	Ngalang	Gedang Sari	Gunungkidul	Tsunami
146	Hargo Mulyo	Gedang Sari	Gunungkidul	Tanah Longsor
147	Mertelu	Gedang Sari	Gunungkidul	Tanah Longsor
148	Tegalrejo	Gedang Sari	Gunungkidul	Tanah Longsor
149	Watu Gajah	Gedang Sari	Gunungkidul	Tanah Longsor
150	Sampang	Gedang Sari	Gunungkidul	Tanah Longsor
151	Serut	Gedang Sari	Gunungkidul	Tanah Longsor
152	Balong	Girisubo	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
153	Jepitu	Girisubo	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
154	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
155	Tileng	Girisubo	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
156	Nglindur	Girisubo	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
157	Jerukwudel	Girisubo	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
158	Pucung	Girisubo	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
159	Songbanyu	Girisubo	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
160	Bejiharjo	Karangmojo	Gunungkidul	Banjir & Tanah Longsor
161	Gedangrejo	Karangmojo	Gunungkidul	Tanah Longsor
162	Ngawis	Karangmojo	Gunungkidul	Tanah Longsor
163	Jatiayu	Karangmojo	Gunungkidul	Tanah Longsor
164	Watusigar	Ngawen	Gunungkidul	Tanah Longsor
165	Beji	Ngawen	Gunungkidul	Tanah Longsor
166	Kampung	Ngawen	Gunungkidul	Tanah Longsor
167	Jurangjero	Ngawen	Gunungkidul	Tanah Longsor
168	Sambirejo	Ngawen	Gunungkidul	Tanah Longsor
169	Tancep	Ngawen	Gunungkidul	Tanah Longsor
170	Kedungkeris	Nglipar	Gunungkidul	Tanah Longsor
171	Nglipar	Nglipar	Gunungkidul	Tanah Longsor
172	Pengkol	Nglipar	Gunungkidul	Tanah Longsor
173	Kedungpoh	Nglipar	Gunungkidul	Tanah Longsor
174	Katongan	Nglipar	Gunungkidul	Tanah Longsor
175	Pilangrejo	Nglipar	Gunungkidul	Tanah Longsor
176	Natah	Nglipar	Gunungkidul	Tanah Longsor
177	Karangduwet	Paliyan	Gunungkidul	Tanah Longsor
178	Karangasem	Paliyan	Gunungkidul	Tanah Longsor
179	Mulusan	Paliyan	Gunungkidul	Tanah Longsor
180	Giring	Paliyan	Gunungkidul	Tanah Longsor
181	Sodo	Paliyan	Gunungkidul	Tanah Longsor
182	Pampang	Paliyan	Gunungkidul	Tanah Longsor
183	Grogol	Paliyan	Gunungkidul	Tanah Longsor
184	Giriharjo	Panggung	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
185	Giriwungu	Panggung	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
186	Girimulyo	Panggung	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
187	Girikarto	Panggung	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
188	Girisekar	Panggung	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
189	Girisuko	Panggung	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
190	Semoyo	Patuk	Gunungkidul	Tanah Longsor
191	Pengkok	Patuk	Gunungkidul	Tanah Longsor
192	Beji	Patuk	Gunungkidul	Tanah Longsor
193	Bunder	Patuk	Gunungkidul	Tanah Longsor
194	Nglegi	Patuk	Gunungkidul	Tanah Longsor
195	Putat	Patuk	Gunungkidul	Tanah Longsor
196	Salam	Patuk	Gunungkidul	Tanah Longsor
197	Patuk	Patuk	Gunungkidul	Tanah Longsor
198	Ngoro-oro	Patuk	Gunungkidul	Tanah Longsor
199	Nglangeran	Patuk	Gunungkidul	Tanah Longsor
200	Terbah	Patuk	Gunungkidul	Tanah Longsor

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Potensi Ancaman
201	Banyusoco	Playen	Gunungkidul	Tanah Longsor
202	Plembutan	Playen	Gunungkidul	Tanah Longsor
203	Bleberan	Playen	Gunungkidul	Tanah Longsor
204	Getas	Playen	Gunungkidul	Tanah Longsor
205	Dengok	Playen	Gunungkidul	Tanah Longsor
206	Ngunut	Playen	Gunungkidul	Tanah Longsor
207	Playen	Playen	Gunungkidul	Tanah Longsor
208	Ngawu	Playen	Gunungkidul	Tanah Longsor
209	Bandung	Playen	Gunungkidul	Tanah Longsor
210	Logandeng	Playen	Gunungkidul	Tanah Longsor
211	Gading	Playen	Gunungkidul	Tanah Longsor
212	Banaran	Playen	Gunungkidul	Tanah Longsor
213	Ngleri	Playen	Gunungkidul	Tanah Longsor
214	Gombang	Ponjong	Gunungkidul	Tanah Longsor
215	Sidorejo	Ponjong	Gunungkidul	Tanah Longsor
216	Bedoyo	Ponjong	Gunungkidul	Tanah Longsor
217	Karangasem	Ponjong	Gunungkidul	Tanah Longsor
218	Ponjong	Ponjong	Gunungkidul	Tanah Longsor
219	Genjahan	Ponjong	Gunungkidul	Tanah Longsor
220	Sumbergiri	Ponjong	Gunungkidul	Tanah Longsor
221	Kenteng	Ponjong	Gunungkidul	Tanah Longsor
222	Tambakromo	Ponjong	Gunungkidul	Tanah Longsor
223	Sawah	Ponjong	Gunungkidul	Tanah Longsor
224	Umbulrejo	Ponjong	Gunungkidul	Tanah Longsor
225	Girijati	Purwosari	Gunungkidul	Tanah Longsor
226	Girichayo	Purwosari	Gunungkidul	Tanah Longsor
227	Giripurwo	Purwosari	Gunungkidul	Tanah Longsor
228	Giritirto	Purwosari	Gunungkidul	Tanah Longsor
229	Melikan	Rongkop	Gunungkidul	Tanah Longsor
230	Bohol	Rongkop	Gunungkidul	Tanah Longsor
231	Pringombo	Rongkop	Gunungkidul	Tanah Longsor
232	Botodayakan	Rongkop	Gunungkidul	Tanah Longsor
233	Petir	Rongkop	Gunungkidul	Tanah Longsor
234	Semugih	Rongkop	Gunungkidul	Tanah Longsor
235	Karangwuni	Rongkop	Gunungkidul	Tanah Longsor
236	Pucanganom	Rongkop	Gunungkidul	Tanah Longsor
237	Krambil Sawit	Saptosari	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
238	Kanigoro	Saptosari	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
239	Planjan	Saptosari	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
240	Monggol	Saptosari	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
241	Kepek	Saptosari	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
242	Nglora	Saptosari	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
243	Jetis	Saptosari	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
244	Dadapayu	Semanu	Gunungkidul	Tanah Longsor
245	Kalitekuk	Semin	Gunungkidul	Tanah Longsor
246	Kemejing	Semin	Gunungkidul	Tanah Longsor
247	Semin	Semin	Gunungkidul	Tanah Longsor
248	Pundungsari	Semin	Gunungkidul	Tanah Longsor
249	Karangsari	Semin	Gunungkidul	Tanah Longsor
250	Rejosari	Semin	Gunungkidul	Tanah Longsor
251	Bulurejo	Semin	Gunungkidul	Tanah Longsor
252	Bendung	Semin	Gunungkidul	Tanah Longsor
253	Sumberrejo	Semin	Gunungkidul	Tanah Longsor
254	Candirejo	Semin	Gunungkidul	Tanah Longsor
255	Kemadang	Tanjungsari	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
256	Kemiri	Tanjungsari	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
257	Banjarejo	Tanjungsari	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
258	Ngestiharjo	Tanjungsari	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
259	Hargosari	Tanjungsari	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
260	Sidoarjo	Tepus	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
261	Tepus	Tepus	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
262	Purwodadi	Tepus	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
263	Giripanggung	Tepus	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
264	Sumberwungu	Tepus	Gunungkidul	Tanah Longsor & Tsunami
265	Mulo	Wonosari	Gunungkidul	Banjir
266	Kepek	Wonosari	Gunungkidul	Banjir
267	Karangtengah	Wonosari	Gunungkidul	Banjir
268	Gari	Wonosari	Gunungkidul	Banjir

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Potensi Ancaman
269	Tegaltirto	Berbah	Sleman	Tanah Longsor
270	Jogotirto	Berbah	Sleman	Tanah Longsor
271	Kalitirto	Berbah	Sleman	Tanah Longsor
272	Sumberharjo	Prambanan	Sleman	Tanah Longsor
273	Wukirharjo	Prambanan	Sleman	Tanah Longsor
274	Gayamharjo	Prambanan	Sleman	Tanah Longsor
275	Sambirejo	Prambanan	Sleman	Tanah Longsor
276	Madurejo	Prambanan	Sleman	Tanah Longsor
277	Bokoharjo	Prambanan	Sleman	Tanah Longsor
278	Sindumartani	Ngemplak	Sleman	Banjir
279	Girikerto	Turi	Sleman	Tanah Longsor
280	Purwobinangun	Pakem	Sleman	Tanah Longsor
281	Candibinangun	Pakem	Sleman	Tanah Longsor
282	Harjobinangun	Pakem	Sleman	Tanah Longsor
283	Pakembinangun	Pakem	Sleman	Tanah Longsor
284	Hargobinangun	Pakem	Sleman	Tanah Longsor
285	Argomulyo	Cangkringan	Sleman	Tanah Longsor
286	Glagahharjo	Cangkringan	Sleman	Tanah Longsor
287	Kepuhharjo	Cangkringan	Sleman	Tanah Longsor
288	Umbulharjo	Cangkringan	Sleman	Tanah Longsor
289	Suryodiningratan	Mantrijeron	Kota Yogyakarta	Banjir
290	Giwangan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta	Gempa Bumi & Banjir
291	Purbayan	Kotagede	Kota Yogyakarta	Gempa Bumi & Banjir
292	Suryatmajan	Danurejan	Kota Yogyakarta	Banjir
293	Tegal Panggung	Danurejan	Kota Yogyakarta	Banjir
294	Bausasran	Danurejan	Kota Yogyakarta	Banjir
295	Sosromenduran	Gedong Tengen	Kota Yogyakarta	Banjir
296	Bumijo	Jetis	Kota Yogyakarta	Banjir
297	Gowongan	Jetis	Kota Yogyakarta	Banjir
298	Cokrodingratan	Jetis	Kota Yogyakarta	Banjir
299	Tegalrejo	Tegalrejo	Kota Yogyakarta	Banjir
300	Bener	Tegalrejo	Kota Yogyakarta	Banjir
301	Kricak	Tegalrejo	Kota Yogyakarta	Banjir

Dasar : Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, Regulasi Penanggulangan Bencana di DIY

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, DIY

Data Bappeda DIY di atas menunjukkan hampir seluruh desa/kelurahan di DIY mempunyai potensi rawan bencana sehingga pemetaan atas hal ini menjadi peta kerawanan provinsi secara keseluruhan. Hal tersebut menjadikan pemetaan kerawanan berdasarkan variabel bencana alam menjadi tidak cukup relevan.

Bab 5: Desain Dan Operasional Pemilu

Di luar empat kategori daerah rawan yang dipetakan oleh KPU, penelitian pada bagian awal ini juga mencoba memetakan kerawanan berdasarkan desain dan operasional pemilu. Sebagai bagian dari proses politik berskala nasional, desain dan operasional pemilu di DIY adalah turunan dari pola-pola yang diterapkan di seluruh Indonesia. Sistem, mekanisme dan regulasi kepemiluan yang berlaku di DIY sama seperti yang berlaku di daerah-daerah lain di negara ini. Dengan demikian, problematika yang dihadapi sebenarnya juga serupa. Namun tentu ada kekhasan sosiologis, demografis dan geografis yang membuat setiap daerah bisa berbeda-beda satu sama lain. FGD yang dilakukan dalam tema ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran awal tentang kekhasan DIY yang mendasari watak penerapan sistem dan mekanisme pemilu di sini. Untuk itu, tim peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan berikut ini dalam FGD yang dihadiri berbagai lapis penyelenggara pemilu mulai dari Ketua KPU DIY, Banwaslu DIY, hingga PPK.

1. Melihat kembali pelaksanaan pemilu 2019, telah siapkah penyelenggara pemilu di lapangan untuk menerapkan pemilu serentak?
2. Apa sajakah menurut Anda permasalahan besar yang dihadapi oleh para stakeholder (penyelenggara, peserta, pemilih, pengawas, pemantau, dan lain- lain) dalam penyelenggaraan pemilu 2019 lalu?
3. Apa solusi yang sebenarnya bisa diambil untuk mencegah/mengatasi permasalahan tersebut?
4. Apa sajakah aspek positif dari penyelenggaraan pemilu 2019 yang bisa dilanjutkan dalam pemilu mendatang?
5. Bagaimanakah karakter hubungan antar stakeholder (penyelenggara, peserta, pemilih, pengawas, pemantau, dan lain-lain) dalam pemilu 2019 lalu? Sudah cukup ideal kah, atau masih jauh dari ideal?

Sebagian besar temuan dalam FGD desain dan operasional pemilu di DIY sama-sekali tak mengejutkan. Pada umumnya, penerapan sistem dan mekanisme pemilu di lapangan berhadapan dengan kendala personalia dan beban kerja, kendala administratif dan tidak cukup memadainya dukungan dari pemerintahan lokal.

Meski hanya mencakup tiga permasalahan inti, namun turunan dari kedua permasalahan itu cukup kompleks. Misalnya, kendala administratif mencakup karakter demografis DIY. Sebagai kawasan pendidikan, DIY banyak dihuni oleh pelajar dan mahasiswa yang merantau. Mereka mempunyai hak pilih yang harus dilayani oleh para penyelenggara pemilu. Tapi urusan itu tidak mudah. Terbatasnya dukungan dari pemerintahan lokal kerap membuat para penyelenggara pemilu di garis depan agak sedikit kesulitan untuk menyiapkan pemungutan suara. Hal ini berkelindan dengan relasi personel pemerintahan dengan eksponen parpol yang merupakan peserta pemilu. Kedua hal ini akan dibahas dalam bagian berikut.

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan personalia pemilu di garis depan adalah waktu rekrutmen yang cenderung pendek. Keluhan utama para penyelenggara pemilu adalah sulitnya menemukan orang yang bersedia sekaligus kompeten untuk menjadi anggota panitia penyelenggaraan pemilu, khususnya KPPS. Di kebanyakan kasus, posisi di KPPS diperlakukan sebagai bagian dari distribusi peran politik lokal di lingkup dukuh atau RW. Mereka yang sudah senior dan terbiasa menjadi ketua KPPS biasanya terus diminta kembali untuk mengemban tugas itu. Ini kerap membuat rekrutmen KPPS problematik, karena faktor sungkan pada orang-orang yang terbiasa menjadi petugas KPPS. Masalahnya, orang-orang lama yang telah berpengalaman menjadi anggota atau ketua KPPS tak selalu lincah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini dalam sistem dan mekanisme kepemiluan yang setiap lima tahun berubah. Anggota KPPS tak jarang masih berpegang pada paradigma kepemiluan yang lama. Sementara itu, kalangan yang lebih muda juga tak selalu berminat untuk turut menjadi bagian dari pelaksanaan pemilu di garis depan. Selain faktor sungkan, mereka juga merasa tak memiliki pengetahuan kepemiluan yang memadai. Ada kekhawatiran bahwa pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemilu akan merepotkan atau bahkan merugikan mereka.

Jadi bilamana KPPS itu Pak Dukuh menunjuk orang yang lebih muda, berwawasan, mereka yang sepuh-sepuh itu merasa, woo kok aku tidak dipakai lagi di kampung. Jadi sistem rekrutmen itu juga perlu dievaluasi...

... untuk KPPS cara mengisi C1 saja dari KPPS itu masih banyak yang belum paham, ini yang kita lakukan di lapangan. Lalu A5 itu apa, cara milihnya jam berapa, itu masih banyak yang belum paham pada saat tanggal 17 April kemarin. (seorang anggota panwascam)

Keluhan tentang ketidak-pahaman beberapa petugas di TPS itu dikonfirmasi oleh para pemilih yang hadir dalam FGD.

[K]alau permasalahannya di sana sih saya melihatnya anggota KPPS-nya sedikit agak kurang siap gitu. Jadi justru mereka kayak nanya ke kita, "mas kalau A5 itu surat suara yang dipilih apa aja ya mas?" Jadi malah kita yang ngasih tahu gitu kalau suratnya seperti ini. (seorang pemilih)

Ketidak-pahaman semacam ini sebenarnya bisa dicegah jika saja para petugas di lapangan memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari (baik secara aktif maupun melalui bimtek) sistem dan mekanisme pemilu. Sayangnya, ini justru yang tidak memadai. Bimtek yang diadakan oleh KPU RI tidak cukup mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada petugas di lapangan. Para peserta FGD mengeluhkan tidak-cukupnya anggaran yang tersedia, sehingga bimtek tak bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan di lapangan. Pengetahuan pemilu di kalangan penyelenggara di lapangan cenderung berlandaskan pengalaman saja, bukan terutama karena pelatihan yang sistematis dan memadai. Senada dengan pengetahuan kepemiluan yang tak sepenuhnya tuntas, pengawasan di lapangan juga tidak berjalan efektif, karena jumlah panwas yang sangat sedikit. Mereka bekerja kebanyakan tanpa dilandasi oleh ketrampilan pengawasan yang memadai. Kondisi keterbatasan pemahaman di kalangan penyelenggara ini disadari oleh banyak pihak sebagai kondisi yang perlu diperbaiki.

[K]ita berpikir bagaimana caranya agar Bimtek dan struktur anggaran yang kita miliki dan SDM yang kita miliki itu, kita membuat Bimtek yang efektif. Kemarin Bimtek itu hanya 3 atau 4 orang saja struktur anggarannya, tapi kemudian dorongan masyarakat itu dan banyak yang mendorong tujuh-tujuhnya (komisioner KPU kabupaten/kota)

Masalah lain yang juga muncul adalah rentang geografis dan demografis. Ukuran wilayah di DIY tidak semuanya ideal. Depok, misalnya, adalah wilayah yang sering dikeluhkan karena ukurannya terlalu besar untuk ukuran sebuah kecamatan. Jumlah penduduk kecamatan Depok setara dengan banyak kota berukuran kecil di daerah-daerah lain. Sementara itu, panitia pemilihan di Depok tetap mengikuti ukuran kecamatan, baik dari jumlah personalia maupun anggarannya. Persoalan di

kecamatan seperti Depok makin kompleks karena di wilayahnya terdapat banyak pendatang. Mereka adalah mahasiswa di sejumlah universitas. Kadang, masalahnya jadi kian kompleks ketika ada kesalahpahaman antara petugas dan pemilih.

[D]i TPS Condongcatur di Perumnas itu ada mahasiswa... [yang]...merasa mempunyai KTP karena mereka mendapatkan informasi dari televisi itu kadang sepihak. Untuk syarat datang ke TPS menjadi pemilih itu yang penting mempunyai KTP elektronik, padahal terusnya itu KTP elektronik yang disitu domisilinya penduduk setempat. Mereka ... ngeyel... Akhirnya [terjadi] baku hantam antara KPPS, Hansiplinmas juga dengan pemilih mahasiswa ...itu. Itu saya dapatkan informasi malah dari teman saya, pengawas TPS saya yang berjaga di TPS itu tidak memberikan informasi itu, tidak dituangkan dalam berita acara pengawasan itu. Saya tanya, "kemarin ada kejadian seperti ini kok jenengan tidak menuangkan dalam berita acara?" "Wah ini sudah kesepakatan dengan Pak Polisi yang ada di situ, wes mas ditutupi wae mas ojo dibuka nanti ndak malah kedowo-dowo." (seorang anggota panwascam)

Masalah klasik dalam aspek ini adalah data pemilih yang tidak akurat. Persoalan ini sangat terasa di Yogya yang memiliki banyak pendatang temporer (pelajar dan mahasiswa). Pendaftaran pemilih tidak selalu berjalan ideal, sebagian terkait dengan kapasitas personalia Pantarlih di lapangan. Tidak semua anggota Pantarlih yang dilantik benarbenar siap untuk langsung bekerja. Bahkan Isi pantarlih banyak dari kepala dukuh. Lalu dia mempekerjakan orang lain, dengan honor dibagi dua

[K]ita menemukan angka sekitar sepuluh persen Pantarlih ini diisi oleh Pak Dukuh dan perangkat desa. Kita mencoba untuk merefleksikan mereka itu bekerja di bawah tangan, di bawah meja atau kita menemukan ... malah mempekerjakan orang lain, jadi fee-nya dibagi dua. Jadi honor nya dibagi dua antara Pak Dukuh dan yang diperintah bekerja di lapangan. (anggota Bawaslu kabupaten/kota)

Catatan lain yang juga sangat menarik adalah relasi kuasa para penyelenggara pemilu dengan otoritas di tingkat lokal, termasuk kepala desa atau kepala dusun, yang kadang memiliki kekuatan politik yang cukup besar, melampaui birokrasi pemerintahan di level kabupaten. Misalnya, pembentukan KPPS sangat dikendalikan oleh kadus dan kades, sebagaimana telah dibahas di atas. Oleh karena itu, pada prakteknya kerjasama langsung dengan kadus dan kades lebih efektif daripada kerjasama dengan pemkab. Pimpinan Bawaslu DIY menekankan bahwa:

[P]arsialitas dihadapi ketika akan merekrut para pengawas di level terbawah karena biasanya Pak Dukuh sudah menyiapkan personel sendiri dan rentan terhadap sikap netral mereka selama pelaksanaan pemilu berlangsung.

Bahkan ada satu kasus di Banguntapan bahwa Pak Dukuh punya kuasa menggeser suara para beberapa calon. (salah seorang anggota Bawaslu DIY)

Kekuasaan otoritas lokal ini juga menjangkau pengelolaan pemilih. Penyelesaian masalah dalam pengelolaan pemilih cenderung fokus pada DPT ketimbang DPTb karena otoritas lokal mempertimbangkan sebuah faktor politis yang sangat penting, yakni bahwa orang-orang yang terdaftar di DPT adalah penduduk tetap yang lebih lama berurusannya, sedang yang di DPTb cuma pendatang yang akan pergi lagi. Kepentingan para otoritas lokal lebih pada pemenuhan kepentingan penduduk setempat. Ini adalah problema yang tak selalu nampak dipermukaan, namun jelas memerlukan perhatian serius karena terkait dengan hak politik warga negara.

Bagian Ketiga: Kerawanan Sosial

Bab 6: Setting Sosial-Politik, Distribusi Kuasa dan Kelompok Vigilante Di DIY

Bagian ini terdiri dari tiga pembahasan utama, yaitu kondisi sosial-politik, distribusi kekuasaan, dan kelompok vigilante dalam konteks DIY. Latar belakang terkait sosial dan politik di DIY perlu dipahami untuk melihat dinamika kelompok vigilante yang berkembang. Kemudian, sebelum masuk ke detail tentang kelompok vigilante, perlu juga dipahami mengenai bagaimana distribusi kuasa terjadi, sehingga pembaca dapat membayangkan dinamika di lapangan terkait fenomena tersebut.

Kondisi Sosial-Politik Masyarakat DIY

DIY merupakan salah satu wilayah yang menjadi barometer dari dinamika sosial-politik nasional di Indonesia. Menurut hasil pengamatan, setidaknya ada 3 (tiga) serial waktu yang dapat menunjukkan dinamika sosial-politik di DIY khususnya terkait kelompok vigilante, yaitu sebelum reformasi, pasca reformasi, dan pasca Undang-Undang Keistimewaan.

Pertama, sebelum reformasi. Masa Orde baru atau sebelum reformasi merupakan era lahirnya berbagai kelompok-kelompok atau laskar khususnya yang saat ini berkembang kokoh di Yogyakarta. Pada masa Orde Baru, kelompok-kelompok ini diposisikan sebagai oposisi pemerintah dengan melekatkan *image* negatif kepadanya, misal Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) menjadi Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Pilihan tu diambil oleh pemerintah untuk menutupi aksi kekerasan yang dilakukan oleh negara di wilayah lain. Di lain sisi, kuatnya militer pada saat itu dan aparat terkait membuat gerakan dari kelompok-kelompok tersebut menjadi terbatas. Mereka akan dimunculkan pada kondisi tertentu saat negara membutuhkan.

Kedua, pasca reformasi. Era demokrasi yang terbuka sekaligus membuka ruang gerak dari kelompok-kelompok atau laskar yang condong berorientasi politik dengan mendasarkan pada ideologi keagamaan maupun nasionalisme. Meski pada prakteknya, ideologi tersebut juga bersifat cair mengikuti kepentingan yang muncul

dari pelbagai aktor yang terlibat. Kelompok-kelompok baru tumbuh subur seiring kebutuhan untuk eksistensi diri dan juga kebutuhan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan oleh kelompok. Sistem pemilu dengan banyak partai semakin memberikan celah untuk berkembang khususnya di level lokal seperti Yogyakarta. Namun, sistem pemerintahan yang didominasi oleh elit Keraton memberikan pola sosial-politik yang berbeda dibandingkan daerah lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa stabilitas sosial politik di DIY tidak lepas dari kuasa Keraton sekaligus sebagai elit penguasa.

Ketiga, pasca UU Keistimewaan. 'Keistimewaan' yang dimiliki oleh DIY semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Keistimewaan DIY. Secara tidak langsung, semakin memperkuat orotitas Keraton dalam mengontrol kondisi sosial-politik di DIY. Meski kejadian yang melibatkan antar kelompok dan berbalut kekerasan terjadi cukup intens, contoh di tahun 2019, tapi eskalasinya dapat diredam oleh Keraton dengan mekanisme dan otoritas yang dimilikinya.

Distribusi Kuasa di DIY

Sub-bab ini akan terkait dengan sub-bab selanjutnya tentang kelompok vigilante di DIY. Berdasarkan pada hasil wawancara mendalam dengan para informan, distribusi kuasa yang terjadi berkaitan langsung dengan aspek ekonomi-politik yang selama ini menjadi basis pergerakan dari kelompok-kelompok vigilante di DIY. Secara tidak kasat mata, sumber daya ekonomi di DIY telah terkotak-kotak dan kepemilikannya melekat pada identitas kelompok tertentu, dimana aktor utama pemberi komando ialah elit politik lokal.

Sumber daya ekonomi yang menjadi perebutan kuasa bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain: lahan parkir, jasa keamanan, dan jasa lainnya yang dapat memperkerjakan anggota dari kelompok. Lahan parkir dapat dikategorisasikan sebagai sumber daya ekonomi utama yang menjadi perebutan wilayah kekuasaan. Dalam satu wilayah administratif, misalnya kecamatan, dapat dikooptasi oleh beberapa kelompok dengan membawa warna bendera masing-masing. Setiap lokasi akan ada penanggungjawab atau disebut 'pentolan' yang berperan sebagai perantara atau *broker*. Dia mengatur pola kerja bawahannya dan kemudian

menyetorkan hasil kerja kepada pemimpin kelompok. Alur distribusi hasil kerja berjalan ke level lebih atas lagi, yaitu elit penguasa. Secara eksplisit, kerja-kerja informal yang dilakukan secara massif oleh kelompok-kelompok vigilante ini diproteksi oleh elit lokal.

Sumber daya ekonomi lain yang tidak kalah besar rupiahnya dibandingkan parkir ialah jasa keamanan. Yogyakarta sebagai kota wisata tentu memiliki berbagai fasilitas bagi wisatawan, misalnya wisatawan mancanegara dengan menyediakan *pub* dan *bar* yang menyajikan minuman keras dan hiburan-hiburan malam lainnya. Lokasi-lokasi tersebut seperti juga lahan parkir telah dikotak-kotak kepemilikannya oleh penguasa. Menurut pemaparan salah satu informan, setiap lokasi tersebut diminta setiap bulannya untuk menyediakan sejumlah uang keamanan guna menjamin keberlangsungan usaha. Mekanisme penyetoran ke atas pun senada dengan lahan parkir.

Kemudian, penyediaan jasa lainnya oleh kelompok-kelompok yang cenderung dianggap sebagai vigilante. Jasa yang ditawarkan seperti penyediaan tenaga kerja melalui mekanisme *outsourcing*, misalnya profesi Satpam, dan lainnya. Tenaga kerja yang disediakan ialah para anggota dari kelompok-kelompok tersebut. Pada titik ini, indikator loyalitas dari para anggota kemungkinan karena faktor pemenuhan kebutuhan ekonomi oleh elit kelompok. Relasi patron klien semacam ini secara terus-menerus direproduksi dalam kelompok guna melanggengkan eksistensi. Meskipun, bukan rahasia umum lagi bahwa di balik relasi tersebut terdapat komersialisasi.

Kelompok Vigilante di DIY

Sebelum memaparkan lebih jauh tentang kelompok yang terkategori sebagai kelompok vigilante di DIY, pemaparan awal dalam sub bab ini dimulai dengan mengidentifikasi siapa yang dimaksud dengan kelompok vigilante di DIY. Pembahasan kemudian berlanjut pada persebaran kelompok vigilante di DIY. Terakhir, pemaparan terkait bagaimana selama ini negara yang diwakili oleh pemerintah setempat memberikan *treatments* terhadap kelompok-kelompok vigilante tersebut.

Berdasarkan data Kepolisian Daerah (POLDA) DIY, selama kurun waktu PEMILU di tahun 2019 telah terjadi lebih dari 10 kali bentrok antara simpatisan massa kelompok-kelompok seperti laskar dan sejenisnya. Bentrokan terjadi antar simpatisan dari partai politik dengan menggunakan bendera kelompok yang berbeda-beda. Dua partai politik yang mendominasi ialah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan). Kelompok simpatisan PPP terdiri atas Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Khittah, GPK resmi, GPK Arafat, dan Laskar GPK Mataram. Sedangkan dari PDIP terdiri atas Tentara Langit, PDIP Jas Merah, Laskar Kalimasodo PDIP. Di luar itu, ada kelompok Front Jihad Indonesia (FJI), Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), dan lainnya.

Dalam perspektif ilmu sosial, seringkali kelompok-kelompok di atas disebut sebagai kelompok vigilante. Rosenbaum and Sederberg (1974) mendefinisikasi kelompok vigilante sebagai kelompok yang melakukan tindakan dengan menggunakan kekerasan yang cenderung bersifat subversif dan melanggar batas-batas ketentuan di masyarakat. Ada tiga jenis tindakan vigilante yang ditawarkan, yaitu: 1) *Crime Control Vigilantism* yang mana kekerasan dilakukan atas dasar kriminalitas; 2) *Social Group Control Vigilantism* dimana aktivitas kekerasan yang dilakukan semata-mata berbasis kompetisi antar kelompok dalam memperebutkan apa yang menjadi kepentingannya masing-masing; dan 3) *Regime Control Vigilantism* yang mana kelompok-kelompok digunakan untuk mengganggu status quo atau digunakan pada saat tertentu ketika pemerintahan dinilai tidak efektif.

Di DIY, kelompok-kelompok atau laskar yang ada lebih condong ke *social group vigilantism* dan *regime control vigilantism*. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka saling bersaing dalam memperebutkan wilayah demi kepentingan ekonominya dan memperluas basis massa. Di sisi lain, tidak terelakkan bahwa mereka juga pada kasus tertentu menjadi alat bagi meluruskan kepentingan elite penguasa. Wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota laskar menemukan bahwa elite kelompok tahu dan sadar dengan kedua posisi di atas, bahwa mereka berada di tengah-tengah. Akan tetapi, mereka tidak serta merta menolaknya. Mereka mengaku memiliki *bargaining position* untuk meloloskan kepentingannya meski

nampak bahwa mereka menjadi alat bagi penguasa.

Secara umum, observasi lapangan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jangkauan kelompok vigilante cenderung berkembang di wilayah perkotaan (urban). Dalam konteks DIY, cakupan wilayah perkotaan ini mengikuti perkembangan wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY). Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) DIY No.2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah menyebutkan bahwa kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, antara lain: Kota Yogyakarta, Kecamatan Depok, sebagian Kecamatan Ngaglik, sebagian Kecamatan Mlati, sebagian Kecamatan Godean, sebagian Kecamatan Gamping, sebagian Kecamatan Ngemplak, sebagian Kecamatan Kasihan, sebagian Kecamatan Sewon, sebagian Kecamatan Banguntapan. Apabila disederhanakan, maka ada 3 kabupaten atau kota sebagai wilayahnya, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

Kota Yogyakarta menjadi basis utama dan pusat koordinasi. Pembagian wilayah kekuasaan antar kelompok di wilayah ini pun bersifat turun-temurun antar generasi kepemimpinan dan nampak jelas garis teritorialnya. Lebih dari itu, pembagian wilayah kekuasaan didasarkan pada kantong-kantong ekonomi, misalnya lahan parkir dan area bisnis khususnya yang menjual minuman keras. Tentu saja potensi ekonomi bagi kelompok vigilante di dua kabupaten lain tidak setinggi apabila dibandingkan dengan Kota Yogyakarta. Meskipun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman tertinggi dibandingkan wilayah lainnya, tapi dinamika kelompok vigilante yang terjadi masih kalah dengan Kota Yogyakarta sebagai sentral dan Kota Bantul menempati posisi kedua. Secara geografis, hal ini terjadi karena *basecamp* kelompok vigilante yang terkategoriakan 'besar' berada di irisan wilayah antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Identifikasi wilayah kekuasaan kelompok vigilante di Yogyakarta dapat dilakukan melalui pemetaan afiliasi kelompok berbasis partai politik dari aktor utama atau familiar disebut 'pentolan'. Meskipun, berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa tidak sepenuhnya persebaran dan pergeseran wilayah kekuasaan tersebut didominasi oleh 'pentolan' kelompok. Hingga penelitian ini dilakukan, belum ada

pihak yang memiliki peta jelas terkait isu pembagian wilayah. Karakteristik kelompok vigilante yang cenderung informal ke arah 'underground' dan cair (fluid) memberikan tantang tersendiri dalam pemetaan wilayah kekuasannya.

Pendekatan Negara

Pasca reformasi, Pemerintah DIY menggunakan pendekatan khusus kepada warganya terutama menyangkut kelompok-kelompok yang berisiko memunculkan konflik sosial (Gibbins, 2017). Sebagai contoh, pada tahun 2006-2007, pemerintah berencana untuk merelokasi Pasar Klithikan yang sebelumnya di area Mangkubumi ke daerah Kuncen. Rencana tersebut sempat mendapat penolakan dari kelompok yang bernama Pethikbumi (Pedagang Klitikan Mangkubumi) dengan asumsi bahwa rencana tersebut belum jelas dan tidak transparan; mereka lebih menekankan pada kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Walikota Yogyakarta saat itu menduplikasi strategi yang digunakan oleh Walikota Surakarta yang sebelumnya berhasil memindahkan pasar serupa tanpa adanya kekerasan. Pendekatan yang digunakan untuk memindahkan Pasar Klithikan saat itu ialah 'Sosialisasi' dan 'Dialog' (*dialoguing/ consulting*) yang melibatkan aktor-aktor yang terlibat langsung maupun komunitas di sekitarnya.

Sejak jaman Orde Baru (Orba), terminologi sosialisasi sudah familiar didengungkan oleh pemerintah dalam menelurkan program-programnya ke masyarakat. Terminologi ini masih menjadi andalan hingga saat ini, meskipun dengan pemaknaan yang berbeda sesuai konteks sosial-politik kekinian. Pemerintahan di jaman Orba mendefinisikan sosialisasi sebagai proses dimana pemerintah membujuk kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki power rendah untuk mengikuti arahnya. Dalam konteks pasca reformasi khususnya dalam kasus relokasi Pasar Klitikan, sosialisasi dipandang sebagai proses yang memberikan keyakinan kepada kelompok-kelompok masyarakat bahwa 'pemindahan' tersebut merupakan pilihan terbaik. Meskipun, jika mengambil sudut pandang dari kelompok bersangkutan, sosialisasi justru dipahami sebagai adanya transparansi dan penjabaran detail perencanaan serta terjadinya konsultasi yang terbuka dibandingkan sebatas kesepakatan yang lebih mengakomodir kepentingan pelaksana program. Persoalannya ialah bahwa hadirnya reformasi memunculkan

kesadaran-kesadaran atas hak asasi manusia yang seringkali kelompok-kelompok tersebut didukung oleh organisasi masyarakat sipil, sehingga tuntutan akan keterbukaan dan interaksi semakin kuat. Hal tersebut memunculkan pendekatan baru dalam bentuk dialog dua arah. Pendekatan dialog menjadi pilihan ketika ia menawarkan interaksi dua arah. Setiap partisipan bisa mengutarakan pendapat dan pikiran di dalamnya. Pendekatan dialog ini dianggap selaras dengan budaya masyarakat Jawa dengan jargonnya ialah memanusiakan manusia.

Pemerintah Kota Yogyakarta memilih pendekatan dialog dalam merangkul kelompok-kelompok tersebut. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para praktisi, pada tahun 2019, pemerintah setempat mengundang kelompok-kelompok untuk hadir dalam 'forum bersama' yang difasilitasi oleh pemerintah sendiri. Tujuan diadakan pertemuan tersebut ialah untuk silaturahmi dan berdiskusi terkait langkah-langkah supaya Jogja tetap aman dan tertib. Forum tersebut mendasarkan pada prinsip dialog.

Sayangnya, partisipan yang hadir dalam forum tersebut lebih didominasi oleh kelompok-kelompok dengan memiliki kedekatan dengan otoritas pemerintah saat itu. Meski hingga saat ini belum diketahui jumlah kelompok-kelompok tersebut dengan pasti, beberapa informan dalam FGD menyatakan bahwa tidak semua kelompok diundang dan/hadir. Selain itu, mereka mengaku tidak terakomodir kepentingannya dalam forum tersebut; kepentingan yang dimaksud ialah terkait sumber daya ekonomi.

Dalam kaca mata perspektif kritis, forum tersebut dianggap sebagai bentuk kontrol tersembunyi atas eksistensi dari kelompok-kelompok yang dilabeli sebagai kelompok vigilante. Berdasarkan pemaparan proses berlangsungnya forum yang didapatkan di lapangan, tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari akan ada tuntutan untuk memformalisasi kelompok-kelompok tersebut. Sebagai catatan, kelompok tersebut memiliki jenjang berdasarkan kekuasaan (*power*). Formalisasi hanya mungkin untuk dilakukan pada jenjang yang paling tinggi. Sisanya, kelompok tersebut bersifat sangat cair (*fluid*), dimana mudah terbentuk dan mudah bubar tergantung kepentingan yang membalutnya.

Bab 7: Kelompok Merah

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, benturan kelompok simpatisan di Yogyakarta pada periode pemilu sangat sering melibatkan dua kategori kelompok, yang biasa disebut kelompok merah yang berafiliasi dengan partai nasionalis dan kelompok hijau yang berafiliasi dengan partai Islamis. Karena signifikansi kelompok pada potensi kerawanan sosial yang tinggi, bab ini akan fokus membahas kelompok merah yang kemudian akan kami sebut dengan kelompok simpatisan. Identifikasi atas salah satu ceruk besar kelompok ini menjadi penting karena peran dan pengaruhnya selama beberapa dekade di Yogyakarta. Di sisi lain, analisis atas survivalitas dan pola gerakan juga menjadi krusial untuk mengantisipasi residu yang dihasilkan.

Bab ini berusaha mengurai karakteristik dan dinamika kelompok-kelompok pemuda simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Data akan disajikan ke dalam beberapa bagian. Pertama, penting bagi kita untuk melihat ke belakang tentang relasi kausal yang menjelaskan kelompok simpatisan pemuda saat ini, yaitu akar sejarah dan garis genealoginya terutama setelah reformasi. Kedua, pendalaman lebih jauh tentang bagaimana kelompok simpatisan ini mengorganisasikan diri juga menjadi penting untuk dilihat. Hal ini akan mampu menjelaskan variasi antar kelompok dan mekanisme survivalitas di mereka. Bagian ketiga yang menjadi titik krusial pada bab ini adalah tentang bagaimana kelompok simpatisan yang cenderung nasionalis ini memposisikan dirinya dalam pemilu, terutama belajar dari kasus Pemilu 2019, baik dalam konteks pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Terakhir, bab ini ditutup dengan refleksi penting dari data yang sudah kita diskusikan.

Akar Genealogi

Penelitian ini menemukan bahwa kelompok-kelompok simpatisan pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setidaknya dapat dibagi menjadi dua, yakni formal dan informal. *Kelompok formal* merupakan kelompok resmi yang dibentuk partai untuk membantu tugas dan fungsi partai. Menurut AD/ART partai,

kelompok formal ini terdiri dari tiga unit, yaitu: badan partai, komunitas juang, dan satuan tugas partai. Pertama, Badan Partai. Badan Partai adalah alat kelengkapan Partai yang dibentuk oleh Partai untuk membantu Dewan Pimpinan Partai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya. Badan Partai bersifat otonom dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya. Kedua, Komunitas Juang Partai. Komunitas Juang Partai berbentuk unit kerja, organisasi sayap, organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya. Komunitas Juang Partai bertugas melakukan pengorganisasian rakyat sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya penggalangan pemilih di luar basis Partai. Ketiga, Satuan Tugas (Satgas) Partai. Satuan Tugas Partai adalah organisasi yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai. Satgas Partai secara internal menjalankan fungsi keamanan dan protokoler, dan secara eksternal menjalankan fungsi kependuan. Satgas Partai secara terstruktur dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan nama Satgas Cakra Buana. Kelompok formal ini tercatat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai sebagai bagian dari alat kelengkapan partai.

Ada timses yang sifatnya memang "resmi" memang itu dibuat oleh struktur tapi ada yang disebut juga relawan. Relawan bisa disebut juga punya kelompok yang sekarang misalnya masih jalan dan beberapa tergabung dalam laskar dan tergabung dalam kelompok-kelompok kecil. (BP, wawancara, 2019)

Sedangkan *kelompok informal* merupakan kelompok tidak resmi yang dibentuk bukan oleh partai, tetapi memiliki afiliasi yang kuat dengan partai maupun kader partai. Wawancara kami dengan beberapa responden menunjukkan bahwa di masa Orde Baru, kelompok informal ini merupakan transformasi dari kelompok preman yang berkuasa di Yogyakarta. Di Yogyakarta dahulu terkenal dengan dua kelompok "gank preman" terbesar yakni Joxzin dan Qzruh. Kelompok preman ini saling bersaing, baik dari luas daerah kekuasaan, jumlah anggota, maupun penguasaan basis ekonomi. Persaingan kelompok ini merambah ke politik dengan mengafiliasikan diri ke partai politik yang ada. Joxzin mengafiliasikan diri ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedangkan Qzruh mengafiliasikan diri ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan kelompok ini mengafiliasikan diri dengan partai. Pertama, untuk mempertahankan

eksistensi dan kekuasaan. Kedua, karena memang “pentolan” atau patron dari masing-masing kelompok merupakan elite satgas partai (wawancara terpisah dengan BP dan IP, elite PDIP).¹

Pasca reformasi, kelompok-kelompok informal ini mulai menjamur. Pola kemunculan kelompok hampir serupa dengan masa sebelumnya. Kelompok informal merupakan bentukan dari elite satgas partai. Elite satgas partai membentuk kelompok informal ini dengan tujuan mempermudah mobilisasi masyarakat agar lebih fleksibel dan tidak terikat oleh aturan partai. Kelompok ini hadir tidak hanya demi kepentingan sesaat dalam pemilu, tetapi juga untuk merawat basis massa PDIP pasca pemilu. Kelompok informal ini tetap menjaga eksistensi pasca pemilu karena dan dirawat oleh elite satgas maupun elite partai. Kami melabeli kelompok ini sebagai kelompok informal ideologis. Kelompok ini sangat fanatik terhadap PDIP karena memang dibentuk oleh elite satgas partai. Pembentukan kelompok ini biasanya berdasarkan kewilayahan; dapat berupa desa/kelurahan ataupun kecamatan. Hal ini karena setiap wilayah tersebut memiliki elit kelompok atau “pentolan”-nya masing-masing yang tidak mau tunduk terhadap elit atau “pentolan” di wilayah lain. Wilayah-wilayah di mana kelompok ini dibentuk merupakan wilayah kekuasaan kultural dari PDIP.

Biasanya base wilayahnya itu di kecamatan misalnya ada juga Banteng Kraton dia orang-orang kecamatan Kraton ada juga yang menyebut Banteng apa gitu ya karena itu laskar yang lama-lama.” (BP, Wawancara, 2019)

Pasca diterapkannya sistem pemilu proporsional terbuka sejak pemilu 2009, dimana nama calon anggota legislatif (caleg) dapat dipilih langsung oleh pemilih dan menentukan keterpilihan caleg dan suara partai, kemunculan kelompok informal semakin menjamur. Hal ini tidak terlepas dari tidak optimalnya mesin partai dalam membantu semua caleg memenangkan kontestasi elektoral (Aspinall, 2014; Aspinall & Berenschot, 2019). Dalam banyak kasus, caleg membutuhkan mesin politik individual untuk menaikkan popularitas dan elektabilitasnya dalam pemilu. Hal ini tidak terlepas dari fenomena dominan dalam banyak kasus pemilu di mana

¹Lihat juga

https://krjogja.com/web/news/read/27172/Gank_Legendaris_Jogja_JOXZIN_Identik_Hijau_QZRUH_Merah;

kandidat menjadi pusat dari segala aktivitas kampanye (Cross & Young, 2015; Mellaz, 2018). Kelompok informal seringkali digunakan oleh caleg sebagai mesin politik. Dalam konteks Yogyakarta, dapat dipastikan hampir semua caleg yang berhasil memenangkan pemilu, menggunakan kelompok informal (wawancara dengan IP, elite PDIP). Hal ini menunjukkan peran sentral kelompok informal ini dalam mobilisasi suara dan memenangkan caleg.

Perbedaan dengan masa sistem proporsional tertutup adalah kelompok informal ini tidak hanya terkait kuantitas, namun juga terkait proses kemunculan kelompok. Kelompok informal tidak hanya dibentuk oleh satgas partai, namun juga orang di luar partai. Kelompok informal seperti ini muncul dan menjamur menjelang pemilu dan hilang pasca pemilu. Hal ini biasanya terlihat dari banyaknya kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan deklarasi dukungan menjelang pemilu.

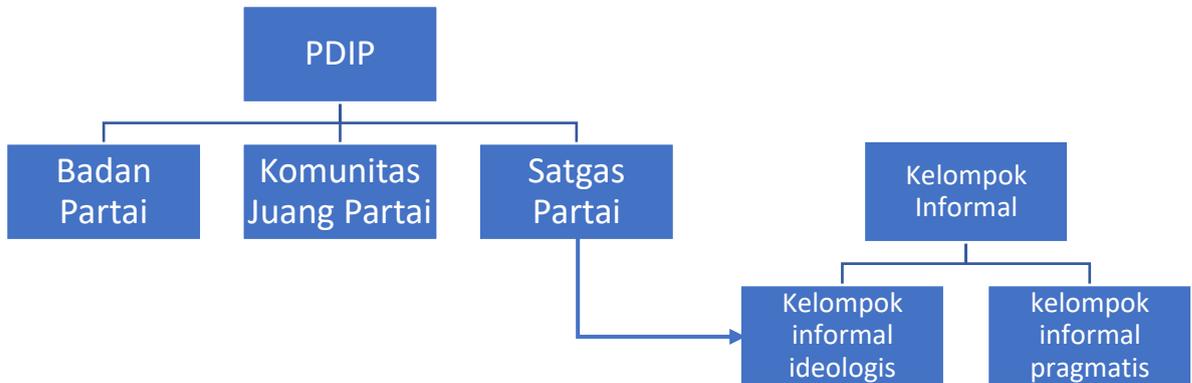
Kalau laskar koordinasinya langsung ke caleg yang dikampanyekan dan yang sekarang mungkin kalau calegnya sudah jadi ya laskar tadi itu bubar dan tidak ada aktivitas lagi. (BP, wawancara, 2019)

Kelompok yang terakhir ini cenderung bersifat pragmatis yang mencari keuntungan dari lemahnya mesin partai dalam memenangkan caleg. Kami melabeli kelompok ini sebagai *kelompok informal pragmatis* karena sifatnya tersebut. Kelompok ini menawarkan jasa pemenangan dan membantu caleg mencarikan paket ideal dengan kandidat lain bahkan kandidat yang berbeda partai (awancara dengan BP, elite PDIP).

Iya benar sangat cair jadi tidak hanya minta uang ke caleg partai dia sendiri tapi ke partai lainnya asal mau membiayai. Sudah ada banyak kejadian dan kita juga beberapa kali melarang gak bisa caleg tertentu kerja sama/ tandem dengan caleg partai lain di tingkatan yang berbeda tapi ini sudah banyak kejadian karena ini paketan urusan kampanye bersama. (BP, Wawancara, 2019)

Dari pembahasan di atas, kelompok informal akhirnya dapat dibedakan menjadi dua yakni kelompok informal ideologis dan kelompok informal pragmatis. Kelompok informal ideologis ini sangat kuat karena dibentuk langsung oleh satgas partai. Kelompok ini dapat menjaga eksistensinya bahkan pasca pemilu. Bahkan beberapa kelompok memiliki surat keputusan pendirian organisasi masyarakat dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Nah, ini yang bagus Tentara Langit sama BSM itu dia terorganisir betul dengan baik dan bisa dikatakan punya akta notaris biasanya kehidupannya dari mana? Biasanya ya dari jaga parkir. (BP, wawancara, 2019)



Relasi antara kelompok formal milik partai dengan kelompok informal

Pada bagan tersebut terlihat bahwa sebenarnya kelompok informal ideologis hubungan yang cukup kuat dengan partai, dalam hal ini satgas partai. Walaupun memiliki hubungan yang kuat, kelompok informal ideologis tidak dalam struktur partai. Kelompok informal ideologis umumnya dibentuk oleh aktor satgas partai, bukan partai politik itu sendiri. Satgas partai secara internal menjalankan fungsi keamanan dan protokoler, dan secara eksternal menjalankan fungsi kepanduan. Fungsi-fungsi ini yang membuat satgas harus paham betul kondisi akar rumput. Dengan membentuk kelompok informal ideologis akan mempermudah fungsi satgas yang ia jalankan sekaligus memperkuat posisi mereka di akar rumput.

Pengorganisasian Kelompok

Berdasarkan analisis akar genealogi di atas, fokus pada kelompok informal yang tidak mempunyai relasi formal dengan partai menjadi penting untuk kita bahas karena penyelenggara pemilu tidak bisa mengandalkan partai karena partai juga tidak mempunyai kendali atas kelompok tersebut. Pertanyaannya, bagaimana kelompok-kelompok simpatisan tersebut mengorganisasikan dirinya baik secara internal maupun external? Kelompok informal ideologis umumnya memiliki struktur yang jelas. Secara umum struktur kelompok informal ideologis terdiri dari empat bagian utama. *Pertama*, elite satgas partai. Elite satgas partai selain sebagai pendiri, memiliki fungsi untuk menghubungkan kebutuhan partai dengan kelompok informal ideologis dan berlaku sebaliknya. Dalam momen pemilu, kader senior partai yang maju sebagai kandidat legislatif maupun eksekutif seringkali menggunakan kelompok informal ideologis ini untuk mobilisasi suara. Kader senior partai dapat berkomunikasi melalui anggota satgas atau langsung dengan pemimpin yang disebut “pentolan kelompok”.

Kedua, Pemimpin atau pentolan kelompok. Pentolan kelompok biasanya merupakan orang kuat yang menguasai wilayah tertentu. Ia tidak hanya menguasai orang-orang (anggota kelompok) di dalam wilayah tersebut, tetapi juga sumber-sumber ekonomi tertentu. *Ketiga*, sekretaris dan bendahara. Sekretaris dan bendahara menjalankan fungsi administrasi kelompok seperti pencatatan aktivitas, keuangan, dan operasional kegiatan. *Keempat*. Pemimpin kelompok kecil. Pemimpin kelompok ini berada di bawah “pentolan kelompok” dan menguasai wilayah yang lebih kecil. Ia langsung membawahi dan berinteraksi dengan anggota-anggota kelompok yang berada di tingkatan struktur terbawah. Beberapa kelompok informal ideologis yang kuat dan terorganisir dengan baik, struktur kepengurusan dapat lintas kecamatan (struktur ke atas) atau mencapai tingkatan kelurahan/desa (struktur ke bawah).



Struktur kelompok informal ideologis

Pembentukan kelompok biasanya didasarkan pada kampung. Kampung menjadi basis pembentukan kelompok karena biasanya di setiap kampung memiliki tokoh-tokoh yang dianggap berkuasa. Tokoh-tokoh yang berkuasa ini sejak awal memang memiliki afiliasi dengan partai karena kedekatan dengan elite dan wilayah tempat tinggalnya yang merupakan basis suara partai. Orang berkuasa ini kemudian menjadi pemimpin kelompok yang menguasai wilayah. Penguasaan wilayah oleh pemimpin kelompok termasuk ruang ekonomi di dalamnya. Pemimpin kelompok di satu wilayah dapat naik pangkat menjadi pemimpin wilayah yang lebih luas jika dianggap memiliki kecerdasan dan pengaruh yang kuat (wawancara dengan IP, elite PDIP).

Selain membantu memenangkan partai dalam setiap pemilu, aktivitas utama kelompok adalah parkir dan penyediaan jasa keamanan. Dua aktivitas sehari-hari ini tersebut menjadi sumber pendanaan utama bagi anggota kelompok. Hampir semua tempat parkir *on the road* dan penjagaan pusat ekonomi di Yogyakarta

memiliki afiliasi oleh partai. Pembagian wilayah dan ruang ekonomi melalui kesepakatan antar tokoh partai di masa lalu, dan sifatnya statis hingga saat ini (wawancara dengan IP, elite PDIP). Ruang-ruang ekonomi tersebut kemudian didistribusikan kepada kelompok-kelompok informal. Parkir dan penyediaan jasa keamanan ini merupakan salah satu sumber pendanaan kelompok.

Ya, benar entah itu jaga parkir, jaga keamanan ya sama lah antara yang hijau sama yang merah itu ya sama saja sumbernya. (BP, wawancara, 2019)

Selain mengandalkan pendanaan dari parkir dan jasa keamanan, sustainabilitas kelompok juga mengandalkan aktivitas yang diberikan anggota legislatif. Aktivitas tersebut mengarah pada *pork barrel*, di mana anggota legislatif memberikan bantuan kepada basis massanya menggunakan anggaran negara untuk menjaga potensi keterpilihannya kembali.

Kelompok Dalam Pemilu

Terkait dengan relasi kelompok simpatisan dengan partai politik—yang dalam hal ini adalah PDIP—kelompok informal ideologis memiliki ikatan yang kuat dengan partai, karena pemimpin kelompok merupakan anggota satgas partai dan wilayah kekuasaannya merupakan basis suara partai. Dalam pemilu, kelompok informal ini dapat dipastikan akan mendukung partai siapapun kandidat yang diusung, baik untuk eksekutif maupun legislatif. Namun, kelompok ini tidak mau terikat dengan aturan partai. Saat Pemilu 2019, satu bulan menjelang hari pemilihan, PDIP mengumpulkan semua kelompok informal yang terafiliasi dengan partai. Kelompok informal ini dikumpulkan untuk konsolidasi kemenangan Pilpres 2019 dan meredam konflik dengan simpatisan partai lain yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Total ada sekitar 107 kelompok informal afiliasi dengan PDIP yang dapat dikumpulkan.

...mengumpulkan di Gowongan itu menjelang tengah kampanye karena memang mereka yang paling banyak bisa membantu kegiatan kami baik itu dalam pemilu legislatif atau presiden dan saya cetuskan secara terbuka dan saya tegaskan bahwa saya tidak bisa memberi perintah ke mereka dan mereka juga boleh tidak tunduk kepada saya. (BP, wawancara, 2019)

PDIP menawarkan pembuatan Surat Keputusan (SK) Partai untuk semua kelompok

agar partai dapat melakukan pelatihan dan koordinasi rutin. Dari 107 kelompok tersebut, tidak ada satupun kelompok informal yang bersedia bergabung resmi dengan partai. Alasan fleksibilitas gerak kelompok dan tidak mau terikat oleh aturan partai menjadi faktor utama penolakan (wawancara dengan BP, elite PDIP).

Iya lha dia inginnya cair seperti pergantian pengurus tanpa masa berlaku sementara kalau di kita kan ada masa berlaku dan menggunakan SK dan rata-rata mereka tidak mau diatur. (BP, wawancara, 2019)

Relasi kelompok informal dengan caleg didasarkan pada kedekatan personal dan kemampuan caleg merawat kelompok. Kelompok informal ini dapat saja berpindah ke caleg lain yang dianggap memiliki sumber daya yang lebih baik, namun masih dalam satu partai. Melihat faktor kedekatan personal dan sumber daya, biasanya hanya beberapa caleg senior yang dapat mengakses kelompok ini. Caleg senior memiliki kemampuan untuk merawat kelompok informal ini tidak hanya sebelum pemilu namun pasca pemilu. Caleg senior juga memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi sehingga lebih dapat menawarkan jaminan jangka panjang bagi kelompok informal.

Seperti dulu kembali ke sejarah BSM (Barisan Shiratal Mustaqim) saya waktu itu belum aktif dan saya ingat tahun 2005-2010an yang membiayai itu almarhum Pak Juwanto karena dia ketua DPD PDIP dan DPRD, dan misalnya Pak Juwanto tidak membiayai ya sudah akan pilih orang lain. (BP, wawancara, 2019)

Pasca pemilu, caleg senior terpilih akan tetap merawat jaringan kelompok informal. Caleg senior terpilih akan membantu pengamanan sumber-sumber ekonomi milik kelompok informal melalui kebijakan. Selain itu caleg senior terpilih juga akan membantu setiap masalah personal anggota kelompok informal, baik terkait kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Caleg senior terpilih memiliki akses untuk mem-bypass birokrasi, dan membantu melalui intervensi kebijakan. Terjadi simboisis mutualisme antara caleg dan kelompok informal, baik pra dan pasca pemilu (wawancara dengan IP, elite PDIP).

Mereka punya timses yang sangat kuat dan yang biayai sampai sekarang ya pasti dia dan salah satu tujuannya adalah sering wira-wiri ke pemda cari anggaran supaya bisa hidup. (BP, wawancara, 2019)

Sementara itu, terkait dengan pembiayaan kelompok, semua pembiayaan selama pemilu disediakan oleh caleg.

Sekarang persoalan yang dihadapi ya tadi itu bagaimana ngopeni-nya kalau tanggung jawab partai ya pasti partai tapi yang tidak jadi tanggung jawab partai ini lah yang menjadi persoalan karena yang ngopeni itu perorangan/ caleg... Nah, ini ada timses calon memang sebetulnya semua keputusan resmi partai tidak mengizinkan semua calon punya timses (seharusnya) tapi lantas yang terjadi karena masalah pendanaan tadi didanai oleh caleg masing-masing karena biayanya tidak kecil ya mas soalnya pendanaan timses itu cukup besar. (BP, wawancara, 2019)

Selain identifikasi atas pembiayaan, penting bagi kita untuk mengidentifikasi basis spasial kelompok ini di wilayah Yogyakarta. berdasarkan basis geografis dan data kepolisian, benturan antar kelompok seringkali terjadi di perbatasan wilayah yang dianggap basis suara partai tertentu. Di Yogyakarta ada beberapa wilayah yang dianggap menjadi basis massa partai tertentu, misal Ngampilan, Patangpuluhan, Jalan Solo, dan lain sebagainya. Benturan antara kelompok seringkali terjadi di wilayah tersebut bukan karena perebutan ekonomi, namun lebih karena menjaga basis suara agar tidak direbut kelompok lain. Basis ekonomi sifatnya sudah statis, misal seperti tempat parkir. Sebagai catatan terakhir pada relasi kelompok dengan pemilu, penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok simpatisan tidak teraktivasi secara maksimal pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Bab 8: Kelompok Hijau

Masa transisi dari rezim otoriter Orde Baru menuju era reformasi membuka kemungkinan-kemungkinan baru untuk akumulasi kekuasaan dari luar lingkaran elit politik (Sidel, 2005:67). Kemungkinan tersebut terbuka, salah satunya, oleh karena konsolidasi elit yang plural dengan beragam kepentingan menciptakan kondisi sosial-politik di mana otoritas melemah di tataran akar rumput (Kristiansen, 2003). Alhasil, kekuatan-kekuatan baru bermunculan di aras lokal, yang bibitnya telah tertanam sejak masa Orde Baru. Bentuk nyata dari kekuatan tersebut adalah hadirnya jejaring ormas-ormas dan laskar-laskar lokal yang perlahan menaruh jangkar kekuasaan di arena-arena ekonomi politik yang dahulu dikuasai oleh rezim, namun perlahan menjadi tak bertuan. Selain berkepentingan untuk 'mengelola' ruang ekonomi perkotaan, jejaring ormas dan laskar tersebut memiliki afiliasi politik yang kuat namun fleksibel dengan partai politik (Kristiansen, 2003). Inilah yang kemudian memunculkan peluang kerawanan sosial di dalam peristiwa pemilu.

Genealogi

Di konteks Yogyakarta, GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah) adalah satu dari sekian anak kandung reformasi. Menurut penelusuran Kristiansen (2003:129), embrio GPK mulai terlihat di tahun 1987 di Kampung Kuncen, tempat di mana laskar PPP (Partai Pembangunan Persatuan) berbasis dan menyumbang 90% suara untuk PPP di Pemilu tahun 1999. GPK kemudian disahkan secara formal sebagai ormas pada tahun 1999. Sejak saat itu, GPK menguasai beberapa kantong-kantong ekonomi perkotaan seperti lahan parkir, jasa keamanan, dan lain sebagainya. Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa reformasi tidak hanya melahirkan GPK, namun beberapa laskar lain yang juga ikut mematok ruang-ruang ekonomi perkotaan. Sumber daya yang tidak banyak kemudian diperebutkan oleh kelompok-kelompok ini. Ditambah lagi, kelompok-kelompok tersebut berada dalam spektrum afiliasi politik yang berbeda dan terpolarisasi ke dalam partai politik yang bersebrangan. Gesekan antar kelompok kemudian penting untuk dikemukakan karena berkaitan erat dengan wilayah geografis di mana bentrokan antar kelompok kerap terjadi di momentum pemilu. Pusat-pusat tersebut berpindah dari dekade ke dekade. Salah

seorang peserta FGD mengungkapkan bahwa 'pada tahun 1980an bantrolan terpusat di daerah Mergangsan, di mana sekarang terkonsentrasi di Terminal Serangan (NO, Anggota KPU).'

Dalam kerangka genealogis atau konteks kemunculan laskar, perpindahan pusat ketegangan dan perebutan lahan tersebut menyiratkan dua hal sentral. Pertama, pendekatan ruang geografis menjadi sangat penting oleh karena basis kelompok-kelompok tersebut didefinisikan dan tumbuh dalam kerangka penguasaan ruang. Kedua, seiring berjalannya waktu, laskar membutuhkan struktur organisasi yang kokoh melalui aktor-aktor kuat (*strongman*) untuk mempertahankan basis kekuasaan wilayah mereka. Struktur ini diisi oleh orang-orang kuat yang memiliki pengaruh besar dan memegang cabang-cabang wilayah dominasi kelompok.

Dalam keterkaitannya dengan pemilu, kedua poin genealogis di atas menjadi pintu masuk yang strategis untuk menganalisis hubungan laskar-laskar tersebut dengan partai politik. Keterkaitan di antara genealogi kelompok dan perannya dalam pemilu terletak pada dua hal mendasar. Pertama, partai politik membutuhkan elektoral yang berbasis ruang geografis di mana laskar-laskar tersebut menggenggam kekuasaan politik akar rumput. Kedua, struktur organisasi yang kokoh melalui aktor-aktor lokal berpeluang untuk menciptakan mesin mobilisasi elektoral yang terorganisasi demi mencapai target suara dalam pemilu (Lihat Sidel, 2005:66-67). Dalam konteks GPK, poin-poin genealogis dan politik elektoral tersebut akan dielaborasi secara lebih seksama melalui dua pokok bahasan di bawah ini, yakni 1) struktur dan klasifikasi kelompok serta 2) peran politis dan kulturalnya dalam pemilu di DIY.

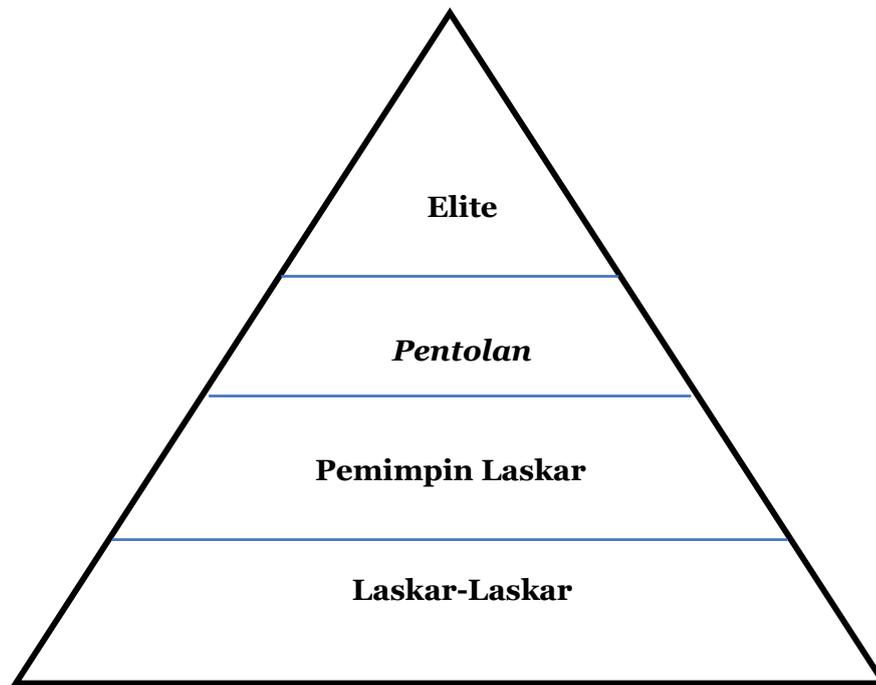
Klasifikasi dan Struktur Kelompok

Laskar-Laskar dari kelompok 'hijau' berjumlah ratusan dan tersebar ke berbagai wilayah di DIY. Salah satu ketua laskar menyebutkan bahwa '*jumlahnya bisa meningkat drastis ketika momentum pemilu*' (wawancara RK, Ketua Laskar). Sebaran dan kuantitas laskar tersebut tidak selalu mengindikasikan afiliasi politik secara formal dengan partai, dalam kasus ini PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Kelompok-kelompok tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe. Pertama,

kelompok yang secara formal berada 'di bawah' PPP (*underbouw*). Kedua, kelompok yang mendukung PPP namun tidak secara formal menjadi bagian dari *underbouw* partai. Salah satu laskar yang menjadi *underbouw* PPP adalah Hamka Darwis, yang mengikuti koridor haluan komando PPP. Sedangkan, GPK mendeklarasikan diri berada di luar PPP dan berfungsi sebagai 'penyeimbang partai' seperti yang diungkapkan oleh salah seorang anggota laskar bahwa:

Nek iki emang tujuane sebagai penyeimbang. Penyeimbang partai, bukan kaki tangan partai tapi penyeimbang partai ketika partai iku kebijakane melenceng GPK sing maju dan memang dulu laskar laskar sing mbentuk laskar di Jogja khusus. (wawancara PN, Anggota Laskar)

Di luar konteks dan momentum pemilu, laskar-laskar tersebut mengadakan kegiatan bakti sosial dan acara-acara serupa. Salah satu anggota laskar menuturkan bahwa saat ini laskar-laskar tersebut sedang berusaha memperbaiki citra di tengah masyarakat. *'Emang kita mau perubahan image, image yang tadinya dari bar bar itu berubah. Sudahlah kita cerdas dan elegan saja, tidak perlu seperti dulu. Memang enggak semudah itu karena citra kami sudah terlanjur demikian di masyarakat, tapi ya enggakpapa, kita coba buat generasi baru'*(wawancara PN, Anggota Laskar). Namun di lain sisi, kegiatan tersebut juga memiliki wajah ganda. Bakti Sosial juga digunakan oleh GPK sebagai strategi *warming up* pra-pemilu agar dapat perlahan-lahan mengambil simpati warga dan *potensial voters*. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota Laskar dalam wawancara bahwa kegiatan sosial serupa merupakan cara-cara kultural di luar pengajian atau acara keagamaan.



Bagan Struktur Laskar. Diolah dari hasil FGD dan wawancara

Di dalam pelaksanaan kegiatan semacam itu, GPK tetap menggunakan struktur komando di mana laskar-laskar kecil di bawahnya dan anggota-anggota mudanya mengikuti perintah dari pemimpinnya. Hal ini merefleksikan struktur kokoh yang dibicarakan di sub bab sebelumnya. Secara umum, struktur GPK terdiri dari Kepengurusan Pusat, *Pentolan (middle man)*, Pemimpin Laskar, dan Laskar-Laskar kecil beserta anggotanya.

Elite laskar pada praktiknya adalah aktor-aktor yang berhubungan dengan elit-elit baik dari partai politik maupun lembaga negara yang bersangkutan seperti kepolisian. Perannya lebih kepada mengelola hubungan-hubungan institusional. Di bawahnya terdapat beberapa *Pentolan-Pentolan* yang memegang wilayah-wilayah kekuasaan GPK. Mereka adalah *Local Strongman* yang berperan mengelola ruang-ruang ekonomi perkotaan. Di bawahnya adalah pemimpin Laskar yang menunggu mandat dari *Pentolan-pentolan* untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik yang berhubungan langsung dengan politik maupun kegiatan lain. Menghuni lapisan terbawah adalah anggota laskar-laskar yang jumlahnya ratusan dan tersebar di seluruh wilayah DIY. Mereka yang biasanya terlihat di jalanan, dimobilisasi, dan dikerahkan untuk berbagai kepentingan.

Struktur tersebut penting untuk dipahami sebagai cara kelompok ini bergerak dan mengelola sumber daya yang ada di sekitar mereka. Sumber daya tersebut termasuk lahan parkir, kebutuhan akan jasa keamanan, dan tentu saja kebutuhan elektoral. Meskipun di struktur GPK yang tergambar di atas terlihat solid. Namun, tidak semua organisasi masyarakat dalam kerangka 'laskar' memiliki struktur yang serupa. Struktur yang tergambar di atas adalah struktur GPK yang mendeklarasikan diri sebagai GPK Resmi dengan berdasar pada AD/ART formal. Bagi RK, salah satu Laskar mengungkapkan bahwa 'GPK hanya satu dan perlu ditegaskan sebab GPK yang lain adalah GPK abal-abal dan tidak resmi terdaftar sebagai ormas' (wawancara RK, Ketua Laskar). Polarisasi yang demikian juga berkait-kelindan dengan fragmentasi di dalam tubuh PPP sendiri di mana kepemimpinan pusat sempat terbuka menjadi dua kubu. Namun demikian, poin penting yang patut digarisbawahi adalah struktur GPK-Resmi yang terlihat *solid* juga merupakan pola umum yang ada di beberapa laskar di Yogyakarta. Salah satu anggota Laskar yang juga memiliki relasi dengan kelompok-sebrang mengungkapkan bahwa '*hampir semua mainnya begitu ada pentolan yang memegang wilayahnya, dan ada laskar beserta pemimpinnya*' (wawancara PN, Anggota Laskar).

Kewilayahan dalam hal ini penting untuk dibicarakan sebab menjadi basis ekonomi, sosial, dan politik laskar dalam hal ini GPK-resmi. Berdasarkan hasil FGD dan wawancara, secara garis besar wilayah Yogyakarta terbagi menjadi dua daerah kekuasaan Laskar. Daerah utara merupakan basis 'merah' dan selatan merepresentasikan basis 'hijau.' Meskipun demikian di dalam generalisasi wilayah tersebut terdapat potongan-potongan daerah kekuasaan tergantung elemen apa yang menjadi basis pembagian tersebut. Misalnya, dalam terma ekonomi, Jalan Magelang di sebelah utara Yogyakarta terbagi menjadi dua: sebelah timur merupakan daerah merah, dan sebelah barat dikuasai oleh hijau. Kecenderungan serupa juga terjadi di Jalan Brigjen Katamsi di selatan Yogyakarta; batas kekuasaan merah hanya sampai Pojok Benteng di mana hijau memulai basis geografisnya. Pembagian wilayah ini telah disadari satu sama lain dan dihormati sebagai sebuah kesepakatan. Salah satu anggota laskar menuturkan bahwa '*jika tidak ada momentum pemilu, pengelolaan wilayah ini menjadi aman saja, namun pemilu memberikan ruang dan waktu untuk eksistensi diri dan lain sebagainya*' (wawancara

PN, Anggota Laskar). Dalam momentum itulah, ruang geografis kekuasaan mulai terlihat 'berwarna.' Salah seorang anggota laskar mengilustrasikannya dengan cara yang demikian:

*Jadi Gini, Mas. J**** itu ada di Selatan iki wes wilyahe J**** dia nggak bisa masuk di Utara nanti pasti ada laskar lain ada pentolan lain, kecuali dia bawa nama J**** disana. J**** kan punya PT dia bikin PT untuk distribusi itu dia berbadan hukum. (Wawancara PN, Anggota Laskar)*

Temuan lain yang menarik di luar klasifikasi, struktur, dan ruang geografis terjelaskan di atas adalah afiliasi GPK dengan supporter klub sepakbola, yang juga terpecah menjadi Merah dan Hijau. Genealogi pecahnya supporter ini bermula di tahun 2000an ketika pemilihan walikota. Salah satu anggota Laskar menuturkan bahwa '*yang memecah itu partai politik di sini untuk kepentingan pemilihan walikota, kalau enggak salah tahun 2004'* (wawancara PN, Anggota Laskar). Sejak saat itu supporter PSIM terbagi menjadi dua: The Maident yang pemimpin dan anggotanya juga berafiliasi dengan Laskar Merah dan Brajamusti yang *pentolan* dan massanya berafiliasi dengan Laskar-Laskar Hijau.

Struktur, Klasifikasi, Ruang Geografis, dan Afiliasi dengan Kelompok Supporter menjadi terma-terma kunci yang berkelindan satu sama lain dan yang merepresentasikan kerumitan hubungan antar masing-masing elemen, terlebih lagi jika dikaitkan dengan pemilu. Struktur yang *solid* menggambarkan ragam kepentingan aktor di setiap lapisannya. Di lain sisi, klasifikasi yang juga tidak tunggal membuat pelacakan akar kerawanan sosial yang diorkestrasi oleh elite melalui laskar juga menjadi sulit dilacak. Di lain sisi, ruang geografis juga berubah dan berpindah seiring bergantinya generasi. Poin-poin yang penting untuk diperhatikan dalam menginvestigasi kaitan antara laskar, pemilu, dan kerawanan di Yogyakarta. Sub bab berikut akan mengelaborasi poin-poin tersebut.

Peran Kelompok Dalam Pemilu

Peran GPK dalam pemilu bersifat cair dan negosiatif bergantung pada kondisi peta politik yang sedang berlangsung. Fleksibilitas yang demikian mungkin terjadi oleh karena secara kelompok GPK mendeklarasikan diri berada di luar PPP. Dalam bahasa salah satu anggota laskar '*tugas GPK adalah mensupport partai dan calon*

yang diusung oleh partai' (wawancara PN, Anggota Laskar). Meskipun demikian, sikap tersebut dapat dikondisikan sesuai dengan peta pertarungan pemilu. Jika PPP tidak mengusung calon, maka sumber daya dapat diarahkan kepada kelompok politik yang membutuhkan. Dalam bahasa laskar, *'ketika calonnya dari Hijau maka GPK akan support total dan menyingkirkan tawaran-tawaran dari luar, namun ketika kita tidak punya Calon dan ada tawaran dari luar, maka kita blak-blak'an wani piro?'* (wawancara PN, Anggota Laskar). Meskipun demikian, prioritas utama dan sumber daya yang dimiliki tetap didedikasikan dan disalurkan untuk kepentingan PPP. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan salah satu anggota laskar bahwa

Ketika lobby lobby iku, [kami menawarkan] Anda bisa berbuat apa untuk GPK dan keuntungan kami apa. Kalau masuk dengan program GPK yasudah ok, tapi ketika ada calon hijau, semua tawaran akan tersingkir secara otomatis. (Wawancara dengan PN, Anggota Laskar)

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa oleh karena fleksibilitas GPK dalam menjalin relasi politis di konteks pemilu, maka pola-pola umum terkait polarisasi Merah dan Hijau tidak dapat disederhanakan sebagai pola yang fix dan tidak berubah. Sebaliknya, hubungan dan peran GPK dalam pemilu bersifat cair dan acapkali berbeda dengan wajah utama PPP. Misalnya, pada pemilu presiden 2019, PPP pusat mendukung pasangan calon 01 di mana GPK Jogja mengambil posisi oposisi dengan mendukung pasangan calon 02. Meskipun demikian, di hadapan fleksibilitas politis, GPK tetap memiliki pola atau cara mendukung calon dan partai dengan sumber daya geografis dan tatanan struktur kelompok.

Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam memandang hubungan GPK dan partai adalah skema transaksional yang memiliki sedikit elemen ideologis. Partai atau calon memiliki kepentingan untuk mendulang suara dan GPK memiliki kepentingan untuk 'menjalankan' program tanpa ada konflik di lapangan. Dalam penuturan salah satu laskar bahwa *'Yang ditawarkan sih sebenarnya simple, ketika ada acara paling ora disetujui... Kita dukung setelah itu ketika kita masukan proposal ya harus disetujui. Selain itu ketika mereka punya kegiatanpun kita support dan harus ada nama GPK di situ'* (wawancara PN, Anggota Laskar). Hubungan ini mungkin oleh karena GPK memiliki basis masa, struktur, dan wilayah kekuasaan yang solid. Salah satu ketua Laskar mengungkapkan bahwa kekuatan GPK kemudian *'dimanfaatkan*

oleh mereka [Calon legislatif dan Elit partai] lima tahun sekali (wawancara RK, Ketua Laskar). Salah satu anggota laskar juga menguatkan argumen ini dengan menimpali bahwa:

Ini (laskar) dilihat oleh calon, terutama DPR RI. Kalau saya melihat fenomena bentuk Pemilu yang terbuka, kemudian caleg DPR RI itu sudah melihat potensi, kalau saya bisa berkoordinasi dengan laskar 10 itu, berarti 1 laskar misalnya 2000 x 10, berarti sudah 20.000 massa konkrit. Dia bisa mengakses suara itu dan itu digunakan ketika sebelum kampanye. (Wawancara PN, Anggota Laskar)

Secara teknis, struktur yang digambarkan pada sub bab sebelumnya relevan untuk menjelaskan secara teknis bagaimana GPK digunakan sebagai mesin elektoral oleh calon legislatif dan elit partai. Aktivasi GPK terbagi dalam dua momentum yakni Pra dan saat pemilu. Pada masa pra pemilu, kegiatan-kegiatan lunak dilakukan sebagai bagian untuk menyusun citra. Pada masa ini pula berlangsung penjajakan dan identifikasi peta politik yang dilakukan oleh *elite dan pentolan-pentolan* yang berpengaruh. Salah satu anggota laskar di level 'menengah' mengungkapkan bahwa pada masa pra-pemilu 'Kita tampung semua sampai ada keputusan apakah ada calon dari Hijau' (wawancara PN, Anggota Laskar).

Pada masa pemilu, struktur GPK kemudian bekerja dalam tiga lapisan utama. Pertama, lapisan elite GPK dan elite partai yang bertransaksi di mana masing-masing memiliki kepentingan ekonomi politik. Kedua, lapisan *Pentolan* dan Pemimpin Laskar yang memiliki kepentingan eksistensial dengan motif ekonomi. Ketiga, lapisan laskar-laskar yang berserak dan mengandung motif eksistensial dengan sedikit elemen atau *gimmick* ideologi agama. Meskipun demikian, salah satu anggota laskar mengungkap bahwa '*tidak ada yang murni ideologi, apalagi kalau orang-orang gede, enggak mungkin murni, kalau yang kecil-kecil mungkin*' (wawancara PN, Anggota Laskar).

Secara praktik, elite GPK dan elite partai akan mengelola orkestrasi dari sumber daya dan basis masa yang tersedia untuk merebut pusat-pusat elektoral. Skema yang umum adalah elite GPK akan menerima 'dana' dari calon atau elite partai untuk kemudian didistribusikan kepada *Pentolan* dan Pemimpin Laskar. *Middleman* inilah yang kemudian mengorganisasikan sumber daya pada laskar-laskar kecil. Sebagai

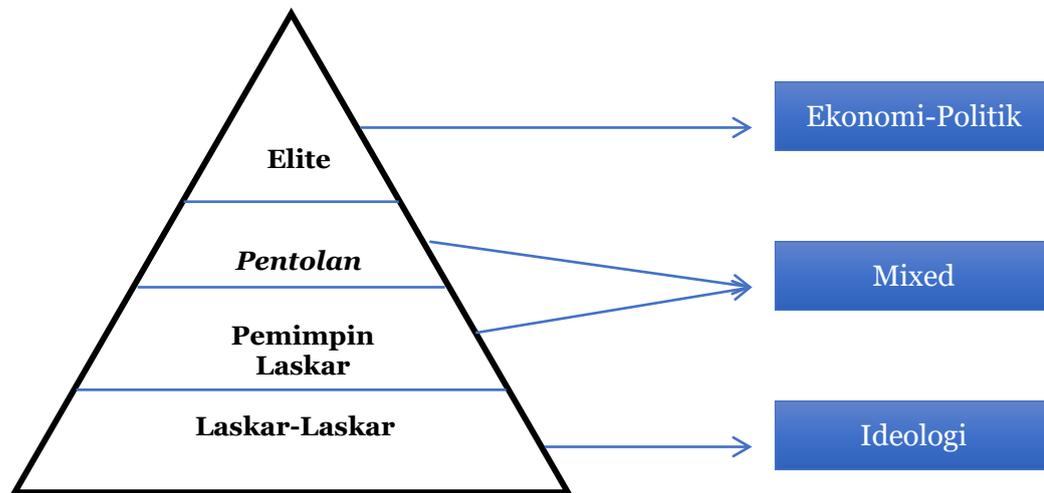
'ganjarannya', *middleman* ini bisa 'mendapatkan jatah lahan parkir atau misalnya kekuasaan di daerah A' (wawancara PN, Anggota Laskar). Mengenai persoalan strategi dan pengkondisian elektoral dan massa sepenuhnya 'diserahkan kepada pentolan dan pemimpin laskar' (wawancara PN, Anggota Laskar). Salah satu anggota laskar menggambarkan cara kerja mesin elektoral dengan ilustrasi sebagai berikut:

So, elit dan pentolan [akan bilang] 'Mas aku tulung ngene ngene tak kei dana semene' misal 1 M katakanlah 500 juta dipegang dia, 500 dibagi kebawah, selesai dia tinggal nyuruh pentolan lainnya iki dana semene piye carane suara semene...sampai ke bawah laskar-laskar mungkin hanya dapat uang bensin. (wawancara PN, Anggota Laskar)

Inilah kemudian yang terkadang menjadi tantangan sebab muncul friksi di lapisan menengah termasuk penggunaan kekerasan yang di luar komando, ketika acapkali mereka berbelok dan 'bermain' dengan sumber daya yang ada. Salah satu ketua laskar mengungkapkan bahwa:

...Cara berpolitiknya ataupun ini semua bisa dibeli dan jujur saya selalu menegaskan kepada anggota saya semua, memang luput sih gak banyak. Cuma saya menegaskan kalau memang posisi yang seperti ini bolehlah kalian bermain, tapi kalau posisi yang satu komando kami, janganlah kalian bermain. Jadi kita bisa mengolah di situ sebenarnya. Paling posisi-posisi yang kita meleset, area-area yang kita kurang kuat lah cuman di situ. Tapi kalau posisi-posisi yang kuat, kita bisa bermain di situ. (wawancara RK, Ketua Laskar)

'Permainan' inilah yang kemudian merepresentasikan kepentingan ekonomi-politik, alih-alih gambaran artikulasi ideologi. Meskipun demikian, hal ini bukan gambaran utuh, sebab 'ideologi' juga masuk sebagai 'aturan-main' yang dalam wajahnya muncul sebagai politik identitas. Gabungan antara politik-identitas dan ekonomi-politik inilah yang membentuk lanskap kerawanan sosial pemilu di DIY. Gambaran ini terasa nyata jika direfleksikan pada struktur aktor yang ada di dalam GPK ketika dikaitkan dengan peristiwa pemilu. Di lapisan pertama, yakni elite partai dan elite laskar – elemen motif ekonomi-politik lebih kuat. Di lapisan kedua, yakni *pentolan* dan Pemimpin Laskar – elemen ekonomi-politik bersinggungan dengan motif ideologi atau politik identitas. Di lapisan paling bawah, yakni laskar-laskar yang kebanyakan anak muda – motif politik identitas lebih mendominasi dibanding dengan elemen ekonomi-politik. Ilustasi atas struktur motif di atas dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Struktur motif

Pada level paling bawah terjadi proses pembentukan identitas (*identity creation*) dengan agama sebagai unsur yang membentuk kesamaan. Dalam bahasa Kristiansen (2003:118), kelompok religius yang kohesif menyediakan rasa kekeluargaan, saling memiliki, kepercayaan, dan komunikasi yang berpengaruh dalam menyusun 'kenyamanan proses pembentukan identitas (*emotional comfort of identity creation*). Proses inilah yang membuat anak-anak muda di lapisan bawah sangat mudah dimobilisasi. Dalam bahasa salah satu anggota laskar '*Pokoknya asal hijau pasti berangkat, apapun komandonya*' (wawancara PN, Anggota Laskar). Secara lebih elaboratif, dia menjelaskan bahwa:

Itu sudah ada tanda kutip "pembibitan" anak-anak muda yang membentuk suatu kumpulan, istilahnya geng yang berafiliasi dengan partai-partai yang sebelum ada 5 tahunan ini memang sudah ada gesekan dan dipakai untuk (tidak jelas) 5 tahunan, justru mereka yang dompleng "aku nekra ijo, ora", "nekra abang, ora." Ketika mereka bertemu, ya udah selesai. (wawancara PN, Anggota Laskar)

Sentimen ini kemudian bertemu dengan kepentingan ekonomi-politik di level elite yang membutuhkan basis masa, di mana sentimen mudah digerakkan dan loyalitas menjadi jaminan. Dalam bahasa Wilson (2010:203), kondisi ini merupakan pertemuan *turfwar* (perang kekuasaan geografis) yang bermuatan ekonomi dengan *electoral war* atau pertarungan perebutan suara dalam konteks demokrasi elektoral. Di balik dua 'peperangan' tersebut, tersirat satu aktor yang tidak terlihat atau yang disebut oleh salah satu pemimpin laskar sebagai raksasa. Kumpulan 'raksasa' inilah

yang sulit untuk diidentifikasi karena tak terlihat dan acapkali berganti wajah. Dalam konteks peta kerawanan sosial dalam pemilu di DIY, mengidentifikasi kumpulan raksasa inilah yang masih menjadi Pekerjaan Rumah yang cukup berat. Di satu sisi, mereka tidak terlihat, di lain sisi posisinya tidak tergoyahkan.

Penutup

Investigasi kelompok hijau dalam konteks kerawanan sosial di Pemilu DIY setidaknya menyingkap tiga hal utama. Pertama, kuasa ruang geografis menyediakan basis wilayah yang relevan bagi pemilu. Kedua, struktur laskar yang solid sangat mudah diorkestrasi untuk kepentingan elektoral. Ketiga, bertemunya kepentingan elite laskar untuk mempertahankan dan memperluas dominasi ekonomi perkotaan dan kepentingan elite partai untuk memastikan konstituen. Keempat, kerawanan sosial dan gesekan antar golongan dalam konteks pemilu di DIY tidak dapat dibaca secara parsial. Gesekan tersebut mengandung lapisan-lapisan politik identitas dan ekonomi-politik dalam satu rantai peristiwa yang menyejarah dan berakar.

Pada poin pertama, laskar menyediakan basis massa di mana partai politik gagal melakukan sosialisasi dan pendidikan politik serta kaderisasi yang efektif. Pada poin kedua, gabungan antara kepentingan ekonomi politik dan politik identitas mempermudah mobilisasi dan orkestrasi massa yang kemudian memunculkan potensi gesekan dan kerawanan sosial. Poin ketiga membuka tabir kepentingan aktor yang bertemu dalam satu momentum besar. Sedangkan poin keempat merupakan gambaran besar yang muncul dari refleksi atas investigasi manuver dan pergerakan dari kelompok hijau. Empat poin inilah yang penting untuk digarisbawahi ketika membicarakan kerawan sosial, setidaknya dari sudut pandang kelompok hijau.

Bagian Empat: Penutup

Bab 9: Kesimpulan

Penelitian ini memotret empat variabel dalam peta kerawanan pemilu sebagaimana yang menjadi acuan Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilu 2019 yakni 1) daerah dengan partisipasi terendah, 2) daerah dengan potensi pelanggaran pemilu, 3) daerah rawan konflik, 4) daerah rawan bencana alam. Dalam perkembangan penelitian, beberapa variabel di atas menjadi tidak relevan untuk memetakan kerawanan elektoral di DIY.

Pertama, secara umum DIY selalu memempati posisi teratas dalam partisipasi pemilih dalam setiap pemilu yang diselenggarakan. Sehingga variabel tingkat partisipasi terendah menjadi tidak relevan dalam menjelaskan kerawanan di DIY. Dibandingkan dengan kuantitas, isu kualitas partisipasi lebih tepat untuk dilakukan kajian mendalam di DIY. *Kedua*, isu kerawanan daerah dengan potensi pelanggaran pemilu dan konflik cukup relevan dalam menjelaskan pemilu di DIY. Hal ini tidak terlepas dari masifnya kampanye offline maupun online yang dilakukan oleh berbagai kelompok selama pelaksanaan pemilu. Selain itu, keberadaan “geng” yang secara tidak langsung terafiliasi dengan partai politik maupun kandidat juga memperkuat potensi pelanggaran dan konflik dalam pemilu. *Ketiga*, isu kerawanan daerah dengan variabel bencana alam juga tidak relevan dalam menjelaskan pelaksanaan pemilu di DIY. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa hampir seluruh desa/kelurahan di DIY merupakan daerah yang rawan dengan bencana alam.

Selain itu, penelitian ini juga melihat kerawanan yang diakibatkan oleh sistem dan desain pemilu yang diterapkan di Indonesia. Hal ini untuk memperoleh gambaran atas kekhasan sosiologis, demografis, dan geografis DIY dalam pelaksanaan pemilu. Salah satu temuan penting dalam fokus penelitian ini adalah bahwa ada kelompok-kelompok non-elektoral yang berada di luar sistem dan desain pemilu yang mempengaruhi proses serta hasil pemilu. Kelompok-kelompok non-elektoral ini kemudian oleh tim dilakukan penajaman melalui penelitian mendalam. Penelitian mendalam tersebut dikerangkai dalam kerangka besar “*Kerawanan Sosial*” sebagai variabel utama yang mempengaruhi keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu di Yogyakarta.

Berdasarkan analisis atas akar sejarah, cara beroperasi, dan relasinya dalam proses elektoral, penting bagi kita untuk menarik benang merah temuan atas kelompok simpatisan yang berafiliasi kuat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerawanan sosial yang banyak melibatkan kelompok simpatisan partai mempunyai beberapa hal yang perlu diperhatikan; dan oleh karenanya diperlukan langkah strategis oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya mitigasi kerawanan sosial tersebut.

Pertama adalah karakteristik kelompok yang rentan menciptakan kerawanan sosial adalah kelompok simpatisan informal karena partai tidak mempunyai kendali atas kelompok-kelompok tersebut dan pada saat yang sama kelompok informal mempunyai otonomi lebih besar dibandingkan kelompok yang secara formal diakui oleh partai atau penyelenggara pemilu. Terkait dengan poin kesimpulan ini, penyelenggara pemilu perlu melakukan identifikasi kelompok-kelompok informal dengan melibatkan partai induk tertama dalam bab ini adalah PDIP serta para calon anggota legislatif. Identifikasi atas ketua atau elit kelompok penting untuk melakukan pendekatan informal kepada masing-masing kelompok.

Kedua adalah konsentrasi kerawanan sosial pada calon anggota legislatif. model pemilu proporsional terbuka memberikan konsekuensi pada proliferasi atau menjamurnya kelompok-kelompok simpatisa yang semakin tidak bisa dikendalikan oleh partai, atau dalam naskah penelitian ini kami sebut sebagai kelompok informal. Hal ini disebabkan oleh basis relasi kelompok simpatisan lebih melekat pada calon anggota legislatif, bukan partai atau organisasi sayap partai yang sudah ada di dalam AD/ART. Berdasarkan kesimpulan ini, penting bagi penyelenggara untuk melakukan idenfitikasi dan langka institusional pengendalian kelompok simpatisan yang melekat dengan calon anggota legislatif, seperti membuat pakta integritas perihal mobilisasi massa oleh caleg, atau kesepakatan lain yang diperlukan. Pengaturan terhadap caleg dalam kaitannya dengan kelompok simpatisa penting dilakukan jika pemilu legislatif ke depan tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Tentu partai politik secara organisasi tetap harus dilibatkan.

Ketiga, kelompok-kelompok simpatisan mempunyai dimensi ekonomi politik

dimana aktivitas mereka melibatkan banyak pihak pemegang otoritas formal baik di eksekutif maupun legislatif. Terkait dengan hal ini, penting bagi penyelenggara pemilu khususnya KPU Provinsi DIY melakukan langkah penyelesaian lebih sistemik baik sebelum atau setelah pemilu dengan melibatkan pihak-pihak yang mempunyai basis otoritas dan relasi dengan sumber-sumber ekonomi kelompok simpatisa, yaitu: jasa keamanan, parkir, dan sektor ekonomi informal lainnya.

Kesimpulan dan rekomendasi di atas tentunya memerlukan pemikiran desain rekaya institusional yang lebih teknis mengingat otoritas yang dimiliki penyelenggara pemilu mempunyai limitasi. Di sisi lain, riset lanjutan untuk menelusuri cara kerja kelompok secara observative di lapangan juga diperlukan terutama pada periode elektoral, terutama pemilu legislatif.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E. (2014). Indonesia's 2014 elections: Parliament and patronage. *Journal of Democracy*, 25(4), 96-110.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: elections, clientelism, and the state in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Blais, A., & Dobrzynska, A. (1998). Turnout in electoral democracies. *European journal of political research*, 33(2), 239-261.
- Cross, W., & Young, L. (2015). Personalization of campaigns in an SMP system: The Canadian case. *Electoral Studies*, 39, 306-315.
- Franklin, M. N. (2004). *Voter turnout and the dynamics of electoral competition in established democracies since 1945*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gibbins, S.L., 2017. Sosialisasi, street vendors and citizenship in Yogyakarta, in: Berenschot, W., Nordholt, H.S., Bakker, L. (Eds.), *Citizenship and Democratization in Southeast Asia*. Brill, pp. 96–122.
- Grossback, L. J., Peterson, D. A., & Stimson, J. A. (2006). *Mandate politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kristiansen, Stein. 2003. 'Violent youth groups in indonesia: the cases of Yogyakarta and Nusa Tenggara Barat', *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, vol.18, no.1, pp.110-138.
- McDonald, M. D., & Budge, I. (2005). *Elections, parties, democracy: Conferring the median mandate*. Oxford: Oxford University Press on Demand.
- Mellaz, A. (2018). Personal vote, candidate-centered politics, dan pembiayaan pileg 2014. In M. Sukmajati, & A. Perdana, *Pembiayaan Pemilu di Indonesia* (pp. 73-94). Jakarta: Bawaslu.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Radcliff, B. (1994). Turnout and the democratic vote. *American Politics Quarterly*, 22(3), 259-276.
- Rosenbaum, H.J., Sederberg, P.C., 1974. Vigilantism: an analysis of establishment violence. *Comp. Polit.* 6, 541–570. <https://doi.org/10.2307/421337>
- Sidel, John T. 2005. 'Bossism and democracy in the Philippines, Thailand and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study of 'Local Strongmen' dalam Harris, John, Kristian Stokke, dan Olle Tornquist (eds). *Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation*. New York: Palgrave Macmillan, pp. 51-71.
- Wilson, Ian. 2010. 'The Rise and fall of political gangsters in Indonesian Democracy' Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (eds). *Problems of Democratisation in Indonesia: Election, Institutions, and Society*. Singapore: ISEAS Publishing, pp. 199-218

